



Jateng
gayeng

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022

bangga
melayani
bangsa

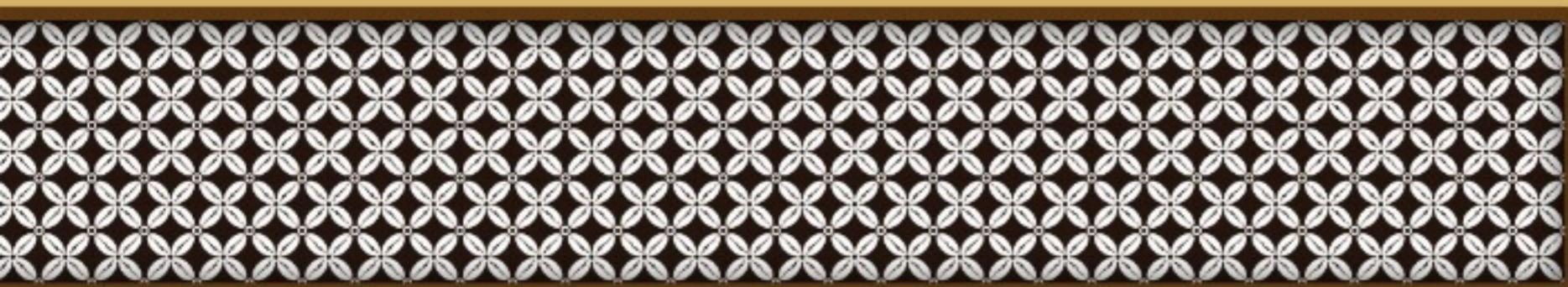
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. PEMUDA 127-133 TELP.(024)3517283-3517284 FAX. (024)3514351
SEMARANG 50132
Surel:<http://inspektorat.jatengprov.go.id> Laman:inspektorat@jatengprov.go.id

@inspektorat_jtg @inspektorat_jtg @inspektorat_jtg @Inspektorat prov Jateng



INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “*good governance*” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2023
Pit. INSPEKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH
Auditor Ahli Madya



DHONI WIDJANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731015 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Isu-Isu Strategis.....	4
1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organusasi.....	6
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	7
1.5 Sistem Penulisan.....	10
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022.....	11
1.7 Landasan Hukum.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	14
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
2.3 Perjanjian Kinerja	20
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	27
Tujuan 1 : Meningkatkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.....	27
1. Sasaran Strategis Ke-1: Meningkatkan elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	27
2. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP ...	33
Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	39
1. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	39
2. Sasaran Strategis Ke-4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	44
3.3 Realisasi Anggaran.....	48
3.4 Kinerja Lain-Lain.....	55
1. Survey Penilaian Integritas (SPI)	55

2.	Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	55
3.	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).....	59
4.	Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	60
5.	Pengendalian Gratifikasi.....	62
6.	LHKPN dan LHKASN.....	64
7.	Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kopsurgah).....	65
8.	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) Periode Pelaporan Tahun 2021-2022	66
3.5	Inovasi	68
1.	E-Takon (Elektronik Tanya Konsultaasi).....	68
2.	SIMWAS Online dan Simwas Dumas (Sistem Pengawasan	69
3.	SIBEKEN (Sistem Informasi Benturan Kepentingan)	71
3.6	Penghargaan-Penghargaan	71
1.	TLHP Terbaik Nasional	71
2.	PPID sebagai Perangkat Daerah Informatif	73
BAB IV	PENUTUP.....	74
4.1	Simpulan.....	74
4.2	Rekomendasi.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
LAMPIRAN I	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
LAMPIRAN II	: Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1.	Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2021	8
1.2.	Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2022	9
1.3.	Data Anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	10
1.4.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	12
2.1.	Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	16
2.2.	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	17
2.3.	Sadaran, Strategi dan, Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	18
2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
2.5.	Program dan Kegiatan Tahun 2022	22
3.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	25
3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2022.....	25
3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1.....	27
3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 dengan Tahun Sebelumnya.....	28
3.5.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	28
3.6.	Elemen Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	29
3.7.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1.....	31
3.8.	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran Strategis ke-1.....	32
3.9.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2.....	34
3.10.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 dengan Tahun Sebelumnya.....	34
3.11.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	35
3.12.	Unsur Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022	35
3.13.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-2.....	35
3.14.	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran Strategis ke-2.....	36
3.15.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3.....	39
3.16.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 dengan Tahun Sebelumnya.....	39

3.17.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	40
3.18.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-3.....	41
3.19.	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran Strategis ke-3.....	41
3.20.	Perbandingan Nilai Kepuasan Masyarakat berdasarkan Aspek yang dinilai Tahun 2021 dan Tahun 2022	44
3.21.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4.....	45
3.22.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 dengan Tahun Sebelumnya.....	45
3.23.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	45
3.24.	Indikator Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022	46
3.25.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-4	47
3.26.	Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran Strategis ke-4.....	47
3.27.	Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2022 (Posisi Per-31 Desember 2022)	49
3.28.	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jateng Tahun 2018-2022	56
3.29.	Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2020 dan 2022	61
3.30.	Klasifikasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 dan 2022..	61
3.31.	Rekapitulasi Daftar Hitam Tahun 2022	62
3.32.	Rekapitulasi Penanganan Gratifikasi Tahun 2017-2022.....	63
3.33.	Rincian Perangkat Daerah Pelapor Gratifikasi Tahun 2021.	63
3.34.	Rekapitulasi Penanganan LHKPN.....	64
3.35.	Rekapitulasi Penanganan LHKASN.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1.	Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	7
1.2.	Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022.....	8
3.1.	Total Capaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengahpada Periode Triwulan VIII (B24)	66
3.2.	Perincian Capaian Penilaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan VIII (B24) ...	66
3.3.	Tampilan Aplikasi E-Takon	69
3.4.	Tampilan Aplikasi SIMWAS Dumas	70
3.5.	Tampilan Aplikasi SIMWAS Online	70
3.6.	Tampilan Aplikasi SIBEKEN	71
3.7.	Penghargaan TLHP Terbaik Nasional dari Kemendagri ...	72
3.8.	Penghargaan Penyelesaian TLHP dari Kemendagri	72
3.9.	Piagam Penghargaan Kategori Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) ditandai dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas serta bebas dari KKN.

Sejak Tahun 2010, pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi telah menggalakkan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh dan diharapkan Tahun 2025 dapat terwujud Birokrasi yang berkelas dunia. Reformasi Birokrasi (RB) sendiri bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan RB tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan

3. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja harus menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja ini terdiri dari Laporan Kinerja intern (triwulanan) dan Laporan Kinerja Tahunan yang selanjutnya disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi.

Sebagai bentuk pelaporan kinerja tahunan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan pelaksanaan program kegiatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang diimplementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2018-2023 untuk mengukur hasil kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Salah satunya yang menjadi harapan keberhasilan dapat membangun penerapan dari *good governance* bagi setiap instansi pemerintah dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran oleh Perangkat Daerah dengan menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berfungsi diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja

dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Prinsip-prinsip *good governance* dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Oleh karena itu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Tengah serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 Isu-Isu Strategis

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, maka aspek strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Kapabilitas APIP ditingkatkan

Perubahan paradigma APIP yaitu melakukan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*consulting activities*). Peran *quality assurance* terdiri atas audit, evaluasi, reviu dan pemantauan. Sedangkan *consulting activities*, antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu disesuaikan dengan pendidikan, keahlian dan ketrampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan professional yang diperlukan untuk secara lebih efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, untuk peningkatan SDM diperlukan pelatihan/diklat guna menambah pengetahuan terkait isu-isu yang berkembang saat ini.

2. Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah

Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* (penjaminan mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK RI merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan ke depan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat hambatan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Jawa Tengah, yaitu:

- a) Kurangnya dukungan *stakeholder* terhadap peran Inspektorat dalam upaya mempertahankan opini WTP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c) Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance*.
- d) Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* memerlukan komitmen semua pihak terkait.

1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilakukan tahapan kegiatan:

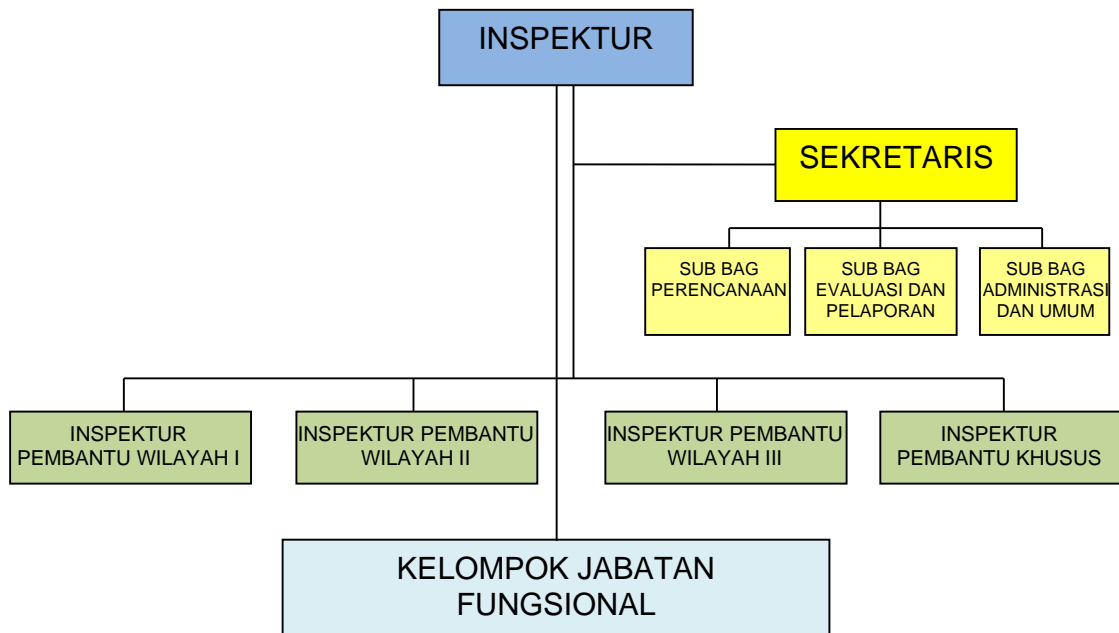
1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi dan nama pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Plt. Inspektur: DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
2. Sekretaris : NUR ROHMAT, S.Sos., M.Si.
 - a) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum: SRI RAHAYUNINGSIH, S.E., M.M.
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan: SODIKUN, S.E., M.Si.
 - c) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan: BAGUS PANUNTUN, S.STP., M.A.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I: Drs. ANTONIUS TRIHANANTO
4. Inspektur Pembantu Wilayah II: SOEMARIJONO, S.E., M.Si.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III: RATNA LUHUNG T., S.E., M.M.
6. Plt.Inspektur Pembantu Khusus: ANTONIUS DWIJO PUTRANTO, S.E., Akt., M.Si.
7. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
 - a) Auditor;
 - b) Auditor Kepegawaian; dan
 - c) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Gambar 1.1 Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

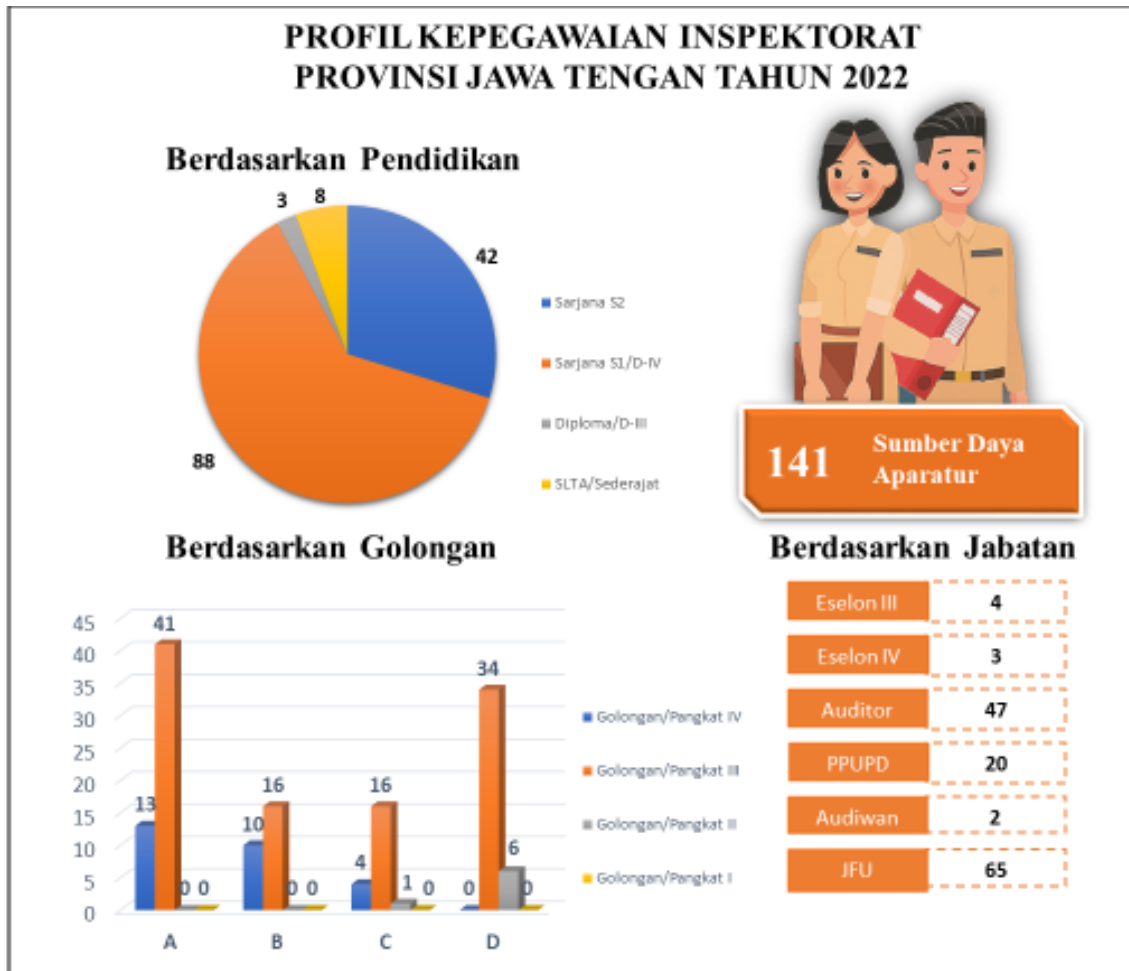


1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 memiliki 138 sumber daya aparatur dan di tahun 2022 memiliki 141 sumber daya aparatur. Dari jumlah tersebut, tidak ada ASN di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan golongan/pangkat I, golongan/pangkat II/a dan II/b, serta golongan/pangkat IV/d. Golongan/pangkat ASN didominasi oleh golongan/pangkat III dengan tingkat Pendidikan mayoritas adalah Sarjana S1/DIV.

Selengkapnya data ASN Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Sumber daya aparatur/kepegawaian
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Aset Inspektorat Prov. Jateng
Tahun 2021

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1.	Tanah	-	-

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
2.	Peralatan dan Mesin	1.519	12.485.050.439
	- Alat Besar	6	169.042.000
	- Alat Angkutan	33	4.205.343.456
	- Alat Bengkel dan Ukur	24	71.400.000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	992	4.708.561.400
	- Alat Studio Komunikasi Pemancar	103	982.658.165
	- Alat Laboratorium	14	122.022.000
	- Alat Persenjataan	1	8.500.000
	- Alat Komputer	346	2.217.523.418
3.	Gedung dan Bangunan	4	13.139.885.450
	- Bangunan Gedung	3	13.125.575.450
	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	14.310.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	181	21.073.000
	- Bahan Perpustakaan	180	19.073.000
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	2.000.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
JUMLAH		1.704	25.646.008.889

Tabel 1.2.
Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.539	13.273.433.774
	- Alat-Alat Besar	7	208.302.000
	- Alat-Alat Angkutan	34	4.782.892.291
	- Alat-Alat Bengkel dan alat ukur	24	71.400.000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.042	4.818.685.900
	- Alat-Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	64	940.908.165
	- Alat-Alat Laboratorium	14	122.022.000
	- Alat Persenjataan	1	8.500.000
- Alat Komputer	353	2.320.723.418	
3.	Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung/Kantor)	4	13.139.885.450
	- Bangunan Gedung	3	13.125.575.450
	- Tugu titik kontrol/pasti	1	14.310.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
5.	Aset Tetap Lainnya	210	23.412.900
	- Bahan Perpustakaan	209	21.412.900
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	2.000.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
JUMLAH		1.753	26.436.732.124

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki Anggaran Tahun 2022 pada awalnya sebesar Rp33.753.566.000,00 lalu dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp32.177.566.000,00 yang digunakan untuk 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Berikut data anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Data Anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp24.771.554.000,00 <i>direcofusing</i> menjadi Rp23.245.938.000,00	APBD
2.	Program penyelenggaraan pengawasan	Rp6.272.457.000,00 <i>direcofusing</i> menjadi Rp6.197.961.000,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp2.709.555.000,00 <i>direcofusing</i> menjadi Rp2.733.667.000,00	APBD

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Isu-isu Strategis
- 1.3 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- 1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- 1.5 Sistematisa Penulisan
- 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022
- 1.7 Landasan Hukum

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
- 2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2022
- 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Efisiensi Anggaran
- 3.3 Inovasi
- 3.4 Penghargaan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- RKT/ Lainnya yang dianggap perlu

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 terdapat 2 (dua) saran/rekomendasi yang diberikan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.4.Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Membuat Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021	Pohon Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
2.	Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan	Nota Dinas Plt. Inspektur Nomor: 863/006/1.3/2023 tgl 27 Januari 2023 tentang penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) 2023

1.7 Landasan Hukum

Landasarn hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

*“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari,
Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”*

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 (empat) misi, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi kedua, yaitu: “Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota”, yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan Target Tahunan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

2. Meningkatnya Tata kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran:

1. Tercapainya Level 3 penuh Kapabilitas APIP;
2. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP Level 3 pada elemen:
 - a) Peran dan Layanan;
 - b) Praktik Profesional dan;
 - c) Struktur Tata Kelola.
2. Maturitas SPIP 3,5 pada unsur:
 - a) Lingkungan Pengendalian;
 - b) Penilaian Resiko;
 - c) Kegiatan Pengendalian;
 - d) Informasi dan Komunikasi;
 - e) Pemantauan dan Pengendalian Intern.

Perkembangan pembangunan Jawa Tengah yang sangat dinamis sampai dengan Tahun 2020 seperti adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta adanya kondisi pandemi *COVID-19* yang tidak terprediksikan dalam penyusunan Rencana Strategis yang berdampak pada semua segi kehidupan dan pembangunan pada setiap tingkatan pemerintahan, menuntut adanya perubahan dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan kepala daerah yang ingin memfokuskan anggaran belanja program kegiatan guna penanganan pandemi *COVID-19* sehingga terjadi perubahan anggaran melalui *recofusing* dan realokasi anggaran tahun 2020 dan sangat berpengaruh terhadap capaian target

kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 pembahasan dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Tercapainya level 3 penuh Kapabilitas APIP	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP: 1. Peran dan Layanan 2. Praktik Profesional 3. Struktur Tata Kelola	Level	3 DC (3 Elemen)	3 DC (3 Elemen)	3 DC (2 Elemen)	3 DC (1 Elemen)	3 Penuh	3 Penuh	3 Penuh
	Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	3,023	3,023	3,1	3,16	3,17	3,18	3,19
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3	87,3
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	83,52	84	85	86	87	87

Sumber : Renstra Perubahan Inspektorat Prov. Jateng 2018-2023

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang hendak dicapai pada tahun 2022 adalah: “Terciptanya Penguatan Pengawasan Intern dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik”. Sesuai dengan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) yang ditargetkan dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP;
2. Tercapainya Nilai 3,18 Maturitas SPIP.

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Level 3 Penuh Kapabilitas APIP	Level	3
		Tercapainya level 3 penuh Kapabilitas APIP	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP: 1. Peran dan Layanan 2. Praktik Profesional 3. Struktur Tata Kelola	Level	3
		Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	3,18

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,3
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,3

Dalam mencapai sasaran secara maksimal terdapat strategi dan arah kebijakan yang yang harus diwujudkan, yaitu:

Tabel 2.3.
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Peningkatkan Level Kapabilitas APiP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APiP Daerah; 2. Penyusunan pedoman audit kinerja yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko; 3. Penyusunan pedoman audit ketaatan yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-07/D3/04/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan.
2.	Meningkatnya Skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Peningkatkan Nilai Maturitas SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai dengan proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART; 2. Penyempurnaan indikator kinerja dan target sasaran strategis pemda/ OPD/ program/ kegiatan maupun sub kegiatan dengan merujuk/ mempertimbangkan tujuan strategis pemda, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; 3. Perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh OPD; dan 4. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan.
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi Pemeriksa dalam hal fungsi <i>consulting partner</i> dan kualitas komunikasi dengan obyek pemeriksaan; 2. Fungsi APIP sebagai <i>early warning system</i> untuk dapat lebih ditingkatkan lagi; 3. Pemeriksaan hendaknya dilakukan terhadap seluruh kegiatan Perangkat Daerah, tidak hanya fokus di salah satu

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kegiatan, sehingga peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat tercapai; 4. Inspektorat sebagai APIP diharapkan dapat menjalankan fungsi pendampingan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan.
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Membuat pohon kinerja sesuai Permenpan dan RB Nomor 89 Tahun 2021; dan 2. Menyusun indikator kinerja utama individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1			
1.	Meningkatkan Penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Level 3 penuh Kapabilitas APIP 2. Nilai 3,19 Maturitas SPIP	Level 3 Nilai 3,18
Sasaran			
1.1	Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level pada 3 elemen: 1. Elemen Peran dan Layanan; 2. Elemen Praktik Profesional; dan 3. Elemen Struktur Tata Kelola.	Level 3
1.2	Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai 3,18
Tujuan 2			
2.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,35
Sasaran			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,35

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87

Tabel 2.5.
Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	a. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD b. Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah	100%	Rp24.771.554.000 Perubahan menjadi Rp23.245.938.000,00
2.	Program penyelenggaraan pengawasan	a. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah b. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas Keuangan Daerah c. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah d. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Khusus e. Persentase Aduan Masyarakat yang dikelola	85%	Rp6.272.457.000,00 Perubahan menjadi Rp6.197.961.000,00

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		f. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	a. Nilai Self Assessment RB Provinsi b. Persentase Capaian Aksi Stranas PK c. Persentase Nilai MCP Korsupgah d. Persentase Penerapan MR di OPD e. Persentase Jumlah Entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	85 75% 85% 10% 100%	Rp2.709.555.000,00 Perubahan menjadi Rp2.733.667.000,00

Perjanjian Kinerja yang dibuat pada tahun 2022 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Tahun 2022 sehingga terdapat penyesuaian didalamnya.

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung penerapan Capaian Kinerja dibutuhkan instrument-instrumen pendukung yaitu sebagai berikut:

1. GRMS (E-Controlling)

E-Controlling adalah salah satu aplikasi terintegrasi dari *Government Resources Management System* (GRMS) Provinsi Jawa Tengah yang dimanfaatkan sebagai halaman kontrol dari SKPD yang bertugas untuk mengontrol realisasi dari perencanaan anggaran dan pendapatan daerah juga untuk menemukan solusi bila ada masalah, dan mencatat laporan pergerakan realisasi tersebut.

2. SIMWAS Online dan SIMWAS Dumas

SIMWAS Online dan SIMWAS Dumas merupakan aplikasi berbasis Web yang dikembangkan untuk mempermudah penginputan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang isinya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

3. E-Takon

E-Takon merupakan aplikasi berbasis android yang dikembangkan sebagai media *advistory activities/consulting activities* antara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan OPD Provinsi Jawa Tengah guna mendapat informasi lebih cepat dan efisien dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan

4. SIBEKEN.

SIBEKEN merupakan aplikasi berbasis Web yang dikembangkan untuk memberikan akses kepada tiap-tiap SKPD untuk melakukan pendataan dan input benturan kepentingan yang ada di masing-masing SKPD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	> 100%;	Sangat Baik
2	85 – 100%;	Baik
3	65 – 84,99%	Cukup
4	50 – 64,99%	Kurang
5	< 50 %	Sangat Kurang

Pada tahun 2022, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 terdapat 2 (dua) tujuan yang harus diwujudkan pada tahun 2022, yaitu:

1. Meningkatkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik; dan
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Persentase	
Tujuan							
1	Meningkatkan Penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Level 3 penuh Kapabilitas APiP	Level	3	3	100%	3
		2. Nilai 3,19 Maturitas SPIP	Nilai	3,18	3,165	99,53%	3,19

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Persentase	
Sasaran							
1.1	Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level pada 3 elemen: 1. Elemen Peran dan Layanan; 2. Elemen Praktik Profesional; dan 3. Elemen Struktur Tata Kelola.	Level	3	3	100%	3
1.2	Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	Nilai	3,18	3,165	99,53%	3,19
Tujuan							
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,30	86,21	98,75%	98,75
Sasaran							
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai	87,30	86,21	98,75%	87,30
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	87	85,13	97,85%	87

3.2 Analisa Capaian Kinerja

Tujuan ke- 1

Meningkatkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Sasaran Strategis ke-1: Meningkatkan elemen Peran dan layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola

Capaian realisasi kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatkan elemen Peran dan layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola” tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, yaitu:

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	
Meningkatkan elemen Peran dan layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	100	Sangat Baik	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri BPKP Perwakilan Jawa Tengah No. PE.09.03/L HP-768/PW11/6/2022, tanggal 30 November 2022

Perbandingan antara target kinerja serta capaian kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022, yaitu:

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan elemen Peran dan layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP	Level 3 DC (1 Elemen)	Level 3 Penuh	120	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	100	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	100

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, yaitu:

Tabel 3.5.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
Dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatkan elemen Peran dan layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	100

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor PE.09.03/LHP-768/PW11/6/2022 tanggal 30 November 2022, disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berada pada “Level 3” dengan skor 3,000 . Capaian ini sekaligus telah menjawab target kapabilitas APIP tahun 2022 yang termuat dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian capaian kapabilitas APIP terdiri dari 6 (enam) elemen sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Elemen Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Capaian Kinerja Sasaran Tercapainya level 3 penuh APIP sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun demikian masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, yaitu:

- 1) Menyusun Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah;
- 2) Menyusun pedoman audit kinerja yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko;
- 3) Menyusun pedoman audit ketaatan yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-07/D3/04/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Umum Audit Ketaatan;
- 4) Menyusun laporan Hasil Audit Kinerja yang memuat aspek ekonomis, efisien dan efektif (3E) serta terkait dengan risiko yang telah teridentifikasi dalam evaluasi *risk register* saat penyusunan PPBR dan pendalaman audit kinerja;

- 5) Program yang dijadikan audit kinerja harus *inline* dengan prioritas pemda dan merupakan lintas sektoral;
- 6) Dalam melakukan identifikasi risiko perlu dilakukan secara hati-hati karena akan menentukan jenis pengawasan yang akan dilakukan, apakah berupa audit kinerja, ketaatan, atau *consulting*;
- 7) Audit ketaatan hendaknya mencakup lingkup program/fungsi yang prioritas dan memiliki risiko tinggi seperti PBJ, Audit Bansos, Promosi dan Mutasi Pegawai, Infrastruktur;
- 8) Perhitungan kebutuhan SDM agar disusun/dimutakhirkan setiap tahun sehingga dapat diperoleh informasi kompetensi SDM yang *update*, serta dapat digunakan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM;
- 9) Menyusun Gap Kompetensi setiap tahun agar diperoleh informasi/data mengenai perkembangan kompetensi masing-masing auditor dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana diklat/bimtek dan PKS untuk menutup gap kompetensi auditor;
- 10) Melakukan evaluasi atas implementasi:
 - a) Rencana Kerja dan Anggaran APIP, agar dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, serta diimplementasikan/ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan;
 - b) Pelaksanaan Anggaran APIP dilaksanakan setiap tahun agar dapat digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya dan diimplementasikan sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan;
 - c) Pelaporan kepada manajemen daerah, sebaiknya dilaksanakan evaluasi penggunaannya setiap tahun untuk memastikan informasi yang disampaikan dalam laporan telah relevan dan tepat guna dan dilakukan perbaikan/ditindaklanjuti apabila diperlukan sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan; dan
 - d) Sistem pengukuran Kinerja APIP, sebaiknya dilaksanakan evaluasi atas implementasi atas pengukuran kinerja Inspektorat untuk mengetahui apakah telah menghasilkan

perbaikan pencapaian kinerja atau belum, dan ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan.

- 11) Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas APIP pada Level 3 dengan mengimplementasikan topik-topik dalam *Internal Audit Capability Model (IACM)* secara terus menerus (*institutionalized*), sehingga mampu menghasilkan *outcome* berupa:
 - a) Peningkatan ketaatan kepada peraturan;
 - b) Perbaikan kinerja (Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas); dan
 - c) Perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian intern dalam pencapaian tujuan organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 12) Melakukan penilaian mandiri secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3 mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Tengah, yaitu:

Tabel 3.7.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan elemen Peran dan layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP	Level 3 Penuh	100	6.197.961.000	6.190.874.964	99,88	0,12

Capaian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran Strategis ke-1

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan elemen Peran dan layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level 3 Kapabilitas APIP	100	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	149,48
				Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus	132,35
				Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	144,45
				Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	135,07
				Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	149,73
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen IHPS	100
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dihasilkan	122,78
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dihasilkan	114,81
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	127,27
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan	112,50
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dihasilkan	108,33

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan dan 2 Kegiatan yaitu:

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 1) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; dan
 - 3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan;
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

Pada target sasaran Peningkatan Kapabilitas APIP tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 tidak dilakukan Penjaminan Kualitas (*quality assurance*) dari BPKP terkait penilaian Level Kapabilitas APIP dikarenakan Pandemi *Covid-19*.

Jika dilakukan perbandingan dengan tahun 2019 yang mendapatkan Level 3 Penuh, maka tahun 2022 juga sama mendapatkan Level 3 Penuh, hal ini menandakan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah mencapai target dan bisa mempertahankan Level 3 Penuh Kapabilitas APIP untuk semua elemen.

2. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP

Capaian realisasi kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP” tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, yaitu:

Tabel 3.9.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Nilai 3,19 Maturitas SPIP	3,18	3,165	99,53	Baik	LHP Cepat Maturitas Terintegritas Nomor: HM.02.00/L HP-958/PW11/3 .1/2022 tanggal 26 Desember 2022

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022, yaitu :

Tabel 3.10.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Nilai 3,19 Maturitas SPIP	3,16	2,87	92,90	3,17	3,11	98,11	3,18	3,165	99,53

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Nilai 3,19 Maturitas SPIP	3,165	3,19	99,21

Capaian indikator kinerja pada sasaran Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 99,21% dan masuk dalam kategori **Baik**. Penilaian Nilai Maturitas SPIP di reviu oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari hasil *Quality Assurance (QA)* dari BPKP dengan nilai 3,165.

Tabel 3.12.
Unsur Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022

No.	Nilai Komponen	Bobot	Hasil Evaluasi (BPKP)
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,200
2.	Struktur dan Proses	30%	0,900
3.	Pencapaian Tujuan	30%	1,065
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,165
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		3,113
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		3,000

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, yaitu:

Tabel 3.13.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-2

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
	Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	3,18	3,165	99,53	2.733.667.000	2.724.363.539	99,66	0,34

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

Tabel 3.14.
Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sasaran Strategis ke-2

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Nilai 3,19 Maturitas SPIP	99,53%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi	100	
				Persentase Penerapan MR di OPD	100	
				Nilai Self Assessment RB Provinsi	103,94	
				Persentase Nilai MCP Korsupgah	110,61	
				Persentase Capaian Aksi Stranas PK	112,27	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100	
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan	100
					Jumlah Dokumen Surveillance ISO	100
			Jumlah Pendampingan MR ke OPD		100	
			Jumlah OPD yang dievaluasi RB		100	
			Persentase Pelaporan LHKPN	100		
			Persentase Pelaporan LHKSN	100		
			Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	100		

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %
1	2	3	4	5	6
				Jumlah Laporan Tahunan Saber Pungli	100

Berdasarkan hasil penilaian Maturitas SPIP Tahun 2022, terdapat beberapa saran kepada Gubernur Jawa Tengah agar:

1. Menetapkan struktur pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Menginstruksikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Kepala OPD agar:
 - a. Menyempurnakan/memperbaiki kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Menyempurnakan indikator kinerja dan sasaran strategis pmda/OPD maupun sasaran program/kegiatan/sub kegiatan dengan merujuk/mempertimbangkan tujuan strategis pmda, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021;
 - c. Menyempurnakan sasaran program dan sasaran kegiatan;
 - d. Menerapkan manajemen risiko secara berkelanjutan
3. Menginstruksikan kepada Kepala Biro Organisasi agar menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
4. Menginstruksikan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah agar:
 - a. Meningkatkan kualitas reviu manajemen risiko;

- b. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan manajemen risiko kepada OPD;
- c. Menyusun Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian risiko;
- d. Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko untuk menilai aspek ekonomis, efisien, dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 didukung oleh 1 Program yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan 2 Kegiatan yaitu:

- a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
 - 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
 - 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Tahun 2022 mendapatkan Skor 3,165 sedangkan tahun 2021 yang mendapatkan Skor 3,11, sehingga realisasi tahun 2022 terdapat kenaikan Skor sebesar 0,055 dibandingkan Tahun 2021.

Tujuan ke-2

Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Sasaran Strategis ke-3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian realisasi kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, yaitu:

Tabel 3.15.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,35	86,21	98,75%	Baik	Dokumen Survey Kepuasan Pelanggan Tahun 2022

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022, yaitu:

Tabel 3.16.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,30	87,43	100,15	87,30	87,11	99,78	87,35	86,21	98,75

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, yaitu:

Tabel 3.17.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Capaian %
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	86,21	87,3	98,75%

Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah sebesar 86,21 (98,75%) atau kategori baik, hal ini dapat menggambarkan seberapa puas pelanggan terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pada aspek penguasaan materi pengawasan, aspek penyampaian komunikasi, aspek pelaksanaan standar audit dan kode etik dan aspek manfaat hasil pemeriksaan, dimana hasil yang dicapai terhadap hasil pemeriksaan dinyatakan puas dan mencapai nilai yang cukup tinggi.

Survei Indeks Kepuasan Pelanggan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 didasarkan pada 4 (empat) aspek yang menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan survei tersebut. Dalam hal ini aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Aspek penguasaan materi pengawasan oleh tim pemeriksa;
- b) Aspek penyampaian komunikasi oleh tim pemeriksa;
- c) Aspek pelaksanaan standar audit dan kode etik; dan
- d) Aspek manfaat hasil pemeriksaan.

Survei kepuasan pelanggan tahun 2022 dilaksanakan pada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah (untuk Kota Salatiga dilakukan survei pada 2 Kegiatan). Responden

adalah Kabupaten/Kota yang menjadi objek pemeriksaan pada tahun 2022.

Secara keseluruhan hasil survei menunjukkan bahwa responden menyatakan sangat setuju dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dinyatakan bermanfaat bagi responden untuk dapat memberikan saran-saran dan masukan kepada Perangkat Daerah untuk lebih baik melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, yaitu:

Tabel 3.18.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-3

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (RP)	Realisasi (RP)	Capaian %	
1	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	87,35	86,21	98,75	22.874.811.000	22.890.988.112	98,85	1,15

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

Tabel 3.19.
Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran Strategis ke-3

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	98,75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah	100
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %
1	2	3	4	5	6
			Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga) didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 7 (tujuh) Kegiatan yaitu:

- a.) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b.) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik daerah SKPD
- c.) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Keg. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- d.) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
 - 3) Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 5) Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e.) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f.) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g.) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Realisasi dari Target Sasaran ketiga ini, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yang mendapatkan nilai 87,11, sedangkan sekarang mendapatkan nilai 86,21, sehingga realisasi tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Perbandingan 4 (empat) aspek penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Perbandingan Nilai Kepuasan Masyarakat berdasarkan Aspek yang dinilai Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Aspek yang Dinilai	Nilai 2021	Nilai 2022
1.	Apek penguasaan materi pengawasan oleh tim pemeriksa	10,79	24,80
2.	Aspek penyampaian komunikasi oleh tim pemeriksa;	22,03	28,04
3.	Aspek pelaksanaan standar audit dan kode etik	28,71	22,33
4.	Aspek manfaat hasil pemeriksaan	25,58	11,05
Total Nilai		87,43	86,21

Secara keseluruhan hasil survei menunjukkan bahwa responden menyatakan Sangat Setuju dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dinyatakan bermanfaat bagi responden untuk dapat memberikan saran-saran dan masukan SKPD untuk lebih baik melaksanakan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah.

Responden memberikan beberapa saran perbaikan untuk Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Inspektorat agar memperbanyak fungsi *consulting partner*;
- b. Langkah pembinaan agar dapat dilaksanakan sejak mulai kegiatan/secara periodik;
- c. Fungsi APIP sebagai *early warning system* untuk dapat lebih ditingkatkan lagi; dan
- d. Inspektorat diharapkan melakukan pendampingan dalam proses awal pelaksanaan kegiatan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan;

2. Sasaran Strategis Ke-4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian realisasi kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, yaitu:

Tabel 3.21.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87	85,13	97,85	Sangat Tinggi	LHE SAKIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.22.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	83,66	98,42	86	83,71	97,38	87	85,13	97,85

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, yaitu:

Tabel 3.23.
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Capaian %
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,13	87	97,85

Capaian indikator kinerja sebesar 85,13 masuk dalam kategori penilaian “A” (Memuaskan) dengan interpretasi memimpin perusahaan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Walaupun apabila dibandingkan dengan Target Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, realisasi 2022 tidak memenuhi target yaitu sebesar 87 hal ini di sebabkan karena belum tersusunnya Indikator Kinerja Individu (IKI) Unit kerja belum selaras dengan IKU dan pemanfaatan Pohon Kinerja dalam pembuatan *cascading* belum secara maksimal.

Penilaian/ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat adalah menggunakan teknik “*criteria referenced survey*”, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan “*professional judgement*” berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

- a) Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
- b) Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- c) Penerapan “*best practice*” dan “*common sense*” yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara Nasional/Internasional.
- d) Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Tabel 3.24.
Indikator Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30%	26,99
b.	Pengukuran Kinerja	25%	20,31
c.	Pelaporan Kinerja	15%	13,87
d.	Evaluasi Kinerja	10%	8,02
e.	Capaian Kinerja	20%	15,94
Nilai Hasil Evaluasi		100%	85,13

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan, saran yang diberikan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Membuat Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021
- b) Menyusun Indikator Kinerja Utama Individu (IKI) yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, yaitu:

Tabel 3.25.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis ke-4

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,13	96,22	88.246.000	80.407.344	91,11	8,88

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

Tabel 3.26.
Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sasaran Strategis ke-4

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program	Indikator Kinerja	Capaian %
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	96,22	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	100

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4, didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 1 kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi Target Sasaran ini pada tahun 2022 senilai 85,13. Sedangkan tahun 2021 mendapatkan nilai 83,71; sehingga realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yaitu kenaikan 1,42.

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengalami beberapa perubahan dikarenakan kondisi wabah covid-19, Anggaran TA. 2022 awal sebesar Rp33.753.566.000,00 lalu dilakukan *refocusing* menjadi sebesar Rp32.177.566.000,00 Anggaran tersebut 100% bersumber dari APBD. Realisasi anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2022, pertanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp31.886.633.959,00

Sehingga alokasi dana kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp23.245.938.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah terealisasi Rp22.971.395.456,00. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Anggaran program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp6.197.961.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah terealisasi Rp6.190.874.964. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu:
- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Anggaran program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.733.677.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp2.724.363.539,00. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh 2 kegiatan yaitu
- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan,
 - b) Pendampingan dan Asistensi.

Tabel 3.27.
Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2022
(Posisi Per 31 Desember 2022)

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	4	5	6
Meningkatnya Kualitas	A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	4	5	6
Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.963.559.000	18.772.218.279	98,99
	a) Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.963559.000	18.772.218.279	98,99
	2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	172.600.000	171.644.450	99,45
	a) Sub Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Belanja premi asuransi	172.600.000	171.644.450	99,45
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	321.907.000	312.341.980	97,03
	a) Sub Keg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Koordinasi/Konsultasi Kepegawaian	192.407.000	190.829.030	99,18
	b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129.500.000	121.512.950	93,83
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.381.000	412.337.731	99,99
	a) Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	100
	b) Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu - Pengadaan makan minum untuk rapat dan tamu	163.299.000	163.255.950	99,97
c) Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.082.000	244.081.781	100	

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	4	5	6
	5. Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.550.000	135.946.200	99,56
	a) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan sarpras serta jasa konsultansi non konstruksi	136.550.000	135.946.200	99,56
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	2.480.981.000	2.420.027.117	97,54
	a) Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	248.161.000	242.468.825	97,71
	b) Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	681.900.000	644.210.529	94,47
	c) Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan dan keamanan	1.332.820.000	1.330.247.763	99,81
	d) Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.100.000	203.100.000	93,12
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.714.000	666.472.355	99,52
	a) Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	297.830.000	295.640.939	99,26

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	4	5	6
	b) Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.594.000	241.051.088	99,78
	c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.290.000	129.780.328	99,61
	8. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.246.000	80.407.344	91,12
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a) Sub Keg. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.018.000	45.286.250	85,42
	b) Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.228.000	35.121.094	99,70
	B. Program Penyelenggaraan Pengawasan			
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.333.161.000	3.693.658.347	85,24
Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	a) Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Pemantauan hasil pemeriksaan	644.437.000	644.363.170	99,99
	b) Sub Keg. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Irbn I)	493.500.000	49.840.648	99,87
	c) Sub Keg. Reviu Laporan Kinerja	46.250.000	45.250.820	98,25
	d) Sub Keg. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	976.060.000	974.677.405	99,86

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	4	5	6
	e) Sub Keg. Reviu Laporan Keuangan	780.000.000	590.289.375	75,68
	f) Sub Keg. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Irbn III)	1.392.914.000	1.389.236.929	99,74
	2.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.864.800.000	1.864.488.617	99,98
	a) Sub Keg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Irbn Khusus)	1.168.200.000	1.168.022.344	99,98
	b) Sub Keg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Irbn II)	696.600.000	696.466.273	99,98
Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
	1.Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	622.574.000	620.817.239	99,72
	a) Sub Keg. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	622.574.000	620.817.239	99,72
	2.Kegiatan Pendampingan dan Asistensi (sekretariat)	242.894.000	242.592.912	99,88
	a) Sub Keg. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	92.624.000	92.556.000	99,93
	b) Sub Keg. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	150.270.000	150.036.912	99,84
	3.Kegiatan Pendampingan dan Asistensi (irban)	1.868.199.000	1.860.953.388	99,61

Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	4	5	6
	a) Sub Keg. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	609.706.000	605.946.975	99,38
	b) Sub Keg. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	965.713.000	963.040.853	99,72
	c) Sub Keg. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	292.780.000	291.965.560	99,72
Jumlah		32.177.566.000	31.886.633.959	99,10

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022 penyerapan anggaran per Sub Kegiatan seluruhnya diatas 90% dari pagu anggaran kecuali Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp780.000.000,- dilakukan belanja sebesar Rp590.289.375 (75,68%) dan Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp53.018.000,- dilakukan belanja sebesar Rp45.286.250,- (85,42%).

Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2022 terdapat efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp31.886.633.959 atau 99,10% dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp32.177.566.000. Sehingga Tahun 2022 terdapat efisiensi Rp290.932.041 atau 0,90%.

3.4 Kinerja Lain-Lain

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tambahan tugas untuk menindaklanjuti kebijakan/ program nasional khususnya dalam rangka penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa yang meliputi:

1. Survey Penilaian Integritas (SPI)

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) sejak tahun 2016. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam memetakan dan membangun upaya-upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas. Survei ini dilakukan secara elektronik terhadap responden pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal), dan pakar/pemangku kepentingan (eksper/stakeholders). SPI telah menjadi program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Adapun indeks hasil SPI tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah adalah **78,17**.

2. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perbandingan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.28.
Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Prov. Jateng
Tahun 2018-2022

No	Perangkat Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	RSUD Dr. Moewardi	86,40	A	89,15	A	89,72	A	89,86	A	89.91	A
2	RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo	85,53	A	89,20	A	89,71	A	89,88	A	89.72	A
3	Dinas Ketahanan Pangan	88,73	A	89,65	A	89,67	A	89,73	A	89.64	A
4	Dinas Kesehatan	75,88	BB	82,88	A	86,22	A	86,66	A	87.27	A
5	DP3AP2KB	78,48	BB	84,23	A	84,60	A	87,50	A	86.99	A
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	70,05	BB	80,70	A	82,31	A	86,04	A	86.7	A
7	RSUD Kelet	83,79	A	87,55	A	86,30	A	84,51	A	85.18	A
8	Inspektorat	83,52	A	83,55	A	83,66	A	83,71	A	85.13	A
9	RSUD Tugurejo	78,54	BB	81,05	A	83,41	A	83,88	A	85.12	A
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	77,93	BB	80,32	A	81,34	A	82,34	A	83.44	A
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	70,14	BB	76,53	BB	77,01	BB	80,64	A	83.3	A
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	77,75	BB	78,63	BB	80,86	A	83,09	A	83.24	A
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	74,60	BB	82,64	A	78,10	BB	83,21	A	83.22	A
14	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta	77,67	BB	80,11	A	80,77	A	81,37	A	83.16	A
15	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	72,83	BB	80,18	A	77,55	BB	80,40	A	83.16	A

No	Perangkat Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
16	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	77,17	BB	78,81	BB	80,15	A	81,40	A	83.04	A
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	73,31	BB	76,41	BB	78,16	BB	79,79	BB	82.97	A
18	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	75,61	BB	79,29	BB	80,54	A	81,68	A	82.91	A
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	61,45	B	75,99	BB	78,63	BB	77,08	BB	82.8	A
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72,95	BB	80,35	A	79,34	BB	80,77	A	82.01	A
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	68,06	B	77,66	BB	80,47	AA	80,61	A	81.47	A
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng	74,62	BB	75,02	BB	77,00	BB	80,17	A	81.37	A
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,39	BB	79,19	BB	78,15	BB	79,59	BB	81.32	A
24	RSJD. Dr.Amino Gondohutomo	72,59	BB	77,81	BB	76,25	A	83,54	A	81.09	A
25	Bappeda	77,14	BB	79,49	BB	80,23	AA	80,33	A	81.02	A

No	Perangkat Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
26	Sekretariat DPRD	64,44	B	77,73	BB	78,10	BB	78,73	BB	80.4	A
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74,37	BB	77,84	BB	79,47	BB	77,23	BB	80.12	A
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	76,03	BB	68,07	B	79,61	BB	79,82	BB	79.83	BB
29	Dinas Sosial	72,88	BB	81,75	A	79,24	BB	79,81	BB	79.63	BB
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	61,89	B	65,54	B	72,16	BB	76,68	BB	79.41	BB
31	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	75,61	BB	81,96	A	74,69	BB	76,59	BB	79.36	BB
32	Badan Kepegawaian Daerah	68,76	B	74,11	BB	74,13	BB	76,47	BB	79.17	BB
33	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	71,31	BB	73,10	BB	75,44	BB	78,78	BB	79.08	BB
34	Badan Penghubung	-	-	71,52	BB	75,32	BB	77,88	BB	78.56	BB
35	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	74,01	BB	74,03	BB	75,13	BB	76,07	BB	78.31	BB
36	Dinas Perhubungan	71,14	BB	75,68	BB	77,31	BB	75,28	BB	78.18	BB
37	Sekretariat Daerah	-	-	73,07	BB	78,10	BB	76,10	BB	77.18	BB
	Biro Perekonomian	60,48	B	-	-	-	-	-	-	-	
	Biro Kesra	61,87	B	-	-	-	-	-	-	-	
	Biro Hukum	63,95	B	-	-	-	-	-	-	-	
	Biro Isda	65,09	B	-	-	-	-	-	-	-	
	Biro Umum	66,45	B	-	-	-	-	-	-	-	

No	Perangkat Daerah	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
	Biro Bangda	67,52	B	-	-	-	-	-	-	-	
	Biro Otda	69,11	B	-	-	-	-	-	-	-	
	Biro Organisasi	75,75	BB	-	-	-	-	-	-	-	
38	Satuan Polisi Pamong Praja	70,33	BB	78,01	BB	70,78	BB	76,53	BB	77,14	BB
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,24	BB	79,97	BB	77,81	BB	75,88	BB	77,04	BB
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61,44	B	67,71	BB	70,08	BB	73,59	BB	76,77	BB
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66,03	B	71,63	BB	72,26	BB	75,00	BB	76,22	BB

3. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Pada tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021 pada 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu:

1. Kabupaten Boyolali;
2. Kabupaten Demak;
3. Kabupaten Kudus;
4. Kabupaten Magelang;
5. Kabupaten Pati;
6. Kabupaten Purworejo;
7. Kabupaten Rembang;
8. Kabupaten Semarang;
9. Kabupaten Sragen;
10. Kabupaten Temanggung;
11. Kota Magelang;
12. Kota Salatiga;
13. Kota Semarang.

Tetapi sampai dengan LKjIP ini dibuat, hasil validasi skor dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 (atas LPPD tahun 2021) dan hasil validasi skor dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 (atas LPPD tahun 2020) masih dalam proses realisasi.

4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima pengaduan masyarakat melalui surat atau surat elektronik, limpahan dari kementerian dan secara online melalui media sosial atau web Laporgub. Pengaduan masyarakat tersebut kemudian dikaji untuk dapat ditindaklanjuti yaitu dengan

pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi atau dilimpahkan ke Kab/Kota, Perangkat Daerah, atau instansi vertikal lain sesuai kewenangannya. Perbandingan penanganan dumas oleh pada tahun 2020 dan tahun 2022 yaitu:

Tabel 3.29.
Rekapitulasi Pengaduan masyarakat Pada Tahun 2020 – 2022

Tahun	Asal Pengaduan								Jumlah	Status Penanganan		Status Tindak Lanjut		
	Surat kpd Inspektur	Limpahan Gubernur (Dispo)	Limpahan Itjen	Limpahan Kementerian	Limpahan Setneg	Laporgub	Media Sosial Gub	Limpahan KPK		S	D	S	D	B
	2020	25	2	7	5	12	137	13		1	202	169	33	162
2021	21	4	3	1	2	40	13	87	45	42	43	41	3	21
2022	30	12	0	2	6	12	8	0	71	52	19	47	17	7

Keterangan:

D= Dalam Proses

B= Belum ditindaklanjuti

S= Selesai di Tindaklanjuti

Berdasarkan jenis penyimpangan pengaduan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.30.
Klasifikasi Pengaduan masyarakat Tahun 2020 – 2022

Jenis Aduan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Penyalahgunaan Wewenang	27	15,88%	9	12%	19	26%
Pelayanan Masyarakat	3	2,94%	4	5%	2	3%
Korupsi	52	30,59%	23	30%	17	24%
Pungli	32	18,82%	26	34%	12	17%
Kepegawaian	6	3,53%	3	4%	7	10%
Pertanahan/Perumahan	5	2,94%	1	1%	1	1%
Hukum/peradilan dan HAM	2	1,18%	6	8%	1	1%
Kewaspadaan Nasional	0	0%	0	0%	0	0%
Tatalaksana/regulasi	4	2,35%	2	3%	4	6%
Lingkungan hidup	1	0,59%	0	0%	1	1%
Umum	36	21,18%	3	4%	7	10%
Jumlah	168	100,0%	77	100,0%	71	100%

Sebagai bagian dari pengaduan masyarakat maka Inspektorat juga melakukan klarifikasi Usulan Rekomendasi Daftar Hitam dari perangkat daerah. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 15 menyatakan bahwa APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan usulan penetapan daftar hitam dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan rekomendasi daftar hitam pada tahun 2022 adalah:

Tabel 3.31.

Rekapitulasi Daftar Hitam Tahun 2022

Perangkat Daerah	No/Tgl Surat Permohonan	Paket Pekerjaan	Rekanan	Rekomendasi
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng	522.371/6962 26 Oktober 2022	Paket Rehabilitasi Jalan Klambu-Purwodadi	CV. Adhi Jaya Sakti	dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun
Dinas PU SDA dan Penataan Ruang Prov. Jateng	522.371/6962 26 Oktober 2022	Paket Perkuatan Tebing Sungai Comal Kab. Pemalang	CV. Yasmin Jaya	dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun
Dinas PU SDA & Taru	611.0/688 tgl 19 Desember 2022	Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Banjarn Kab. Banyumas (DAK)	CV Sembada	dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun

5. Pengendalian Gratifikasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah terdapat Tim

Program Pengendalian Gratifikasi pada seluruh Perangkat Daerah sehingga diharapkan Perangkat Daerah tersebut dapat menjadi agen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), selain itu juga dilaksanakan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah-sekolah. Pada bulan Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 terdapat 36 laporan dengan nilai finansial Rp31.321.000,00

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah menerima laporan gratifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.32.
Rekapitulasi Penanganan Gratifikasi
Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Laporan	Nilai Laporan (Rp)
2017	19	Rp8.365.000,00
2018	14	Rp61.092.927,00
2019	19	Rp10.250.000,00 dan SGD 1.000
2020	11	Rp6.665.000,00
2021	33	Rp18.357.300,00
2022	36	Rp31.321.000,00
Total	96	Rp104.729.927 dan SGD 1.000

Adapun rincian Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan gratifikasi pada tahun 2022 yaitu:

Tabel 3.33.
Rincian Perangkat Daerah Pelapor Gratifikasi
Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Nominal (Rp)
1.	Inspektorat	24	5.851.000
2.	RSJD Surakarta	2	550.000
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	18.190.000
4.	RSUD Tugurejo	1	1.000.000
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	680.000

6.	DPMPTSP	1	150.000
7.	Dinas LH dan Kehutanan	1	1.500.000
8.	PT BPR BKK Jawa Tengah	5	3.400.000
Jumlah		36	31.321.000

Sumber. Gol.kpk.go.id

6. LHKPN dan LHKASN

Inspektorat telah melakukan fasilitasi LHKPN pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada awal tahun 2022 untuk pelaporan LHKPN tahun 2021. Pelaporan LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan asas transparansi bagi aparatur negara. Sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah No. 700/10 tanggal 7 Juli 2017 tentang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa seluruh pejabat eselon dan BUMD wajib untuk melaporkan LHKPN sebagai persyaratan seleksi pengangkatan Pejabat Struktural dan seluruh ASN Provinsi Jawa Tengah untuk melaporkan LHKPN. Pada tahun 2021 jumlah Wajib Lapor yang sudah melaporkan sebanyak 2.283 orang dari 2.283 orang (100%).

Adapun pengelolaan LHKPN selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.34.
Rekapitulasi Penanganan LHKPN

Tahun	Jumlah Wajib LHKPN	Sudah Lapor	Belum Lapor
2017	1.648	1.641 (99,58%)	7 (0,42%)
2018	2.392	2.392 (100%)	0
2019	2.419	2.419 (100%)	0
2020	2.320	2.320 (100%)	0
2021	2.283	2.283 (100%)	0

Sementara untuk jumlah Wajib LHKASN per 31 Desember 2022 yang telah melapor harta kekayaannya sebanyak 36.281 (100%) dari 36.281 Wajib LHKASN.

Tabel 3.35.
Rekapitulasi Penanganan LHKASN

Tahun	Jumlah Wajib LHASN	Sudah Laport	Belum Laport
2020	38.214	37.731 (98,7%)	483 (1,3%)
2021	38.198	38.198 (100%)	0 (0%)
2022	36.281	36.281 (100%)	0

7. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah)

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pada Pemerintah Daerah, KPK RI telah meluncurkan program MCP (*Monitoring Centre of Prevention*). Implementasi pencegahan korupsi melalui program MCP pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
- c) Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
- d) Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Realisasi capaian MCP Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 mendapatkan skor 94,81. Adapun rincian capaian per area intervensi Tahun 2022 sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1) Perencanaan dan Penganggaran APBD | : 91,25 |
| 2) Pengadaan Barang dan Jasa | : 99,10 |
| 3) Perijinan | : 100,00 |
| 4) Pengawasan APIP | : 91,40 |
| 5) Manajemen ASN | : 100,00 |
| 6) Optimalisasi Pajak Daerah | : 87,74 |
| 7) Manajemen Aset Daerah | : 93,73 |

8. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) Periode Pelaporan Tahun 2021-2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) . Sedangkan tujuan Stranas PK adalah:

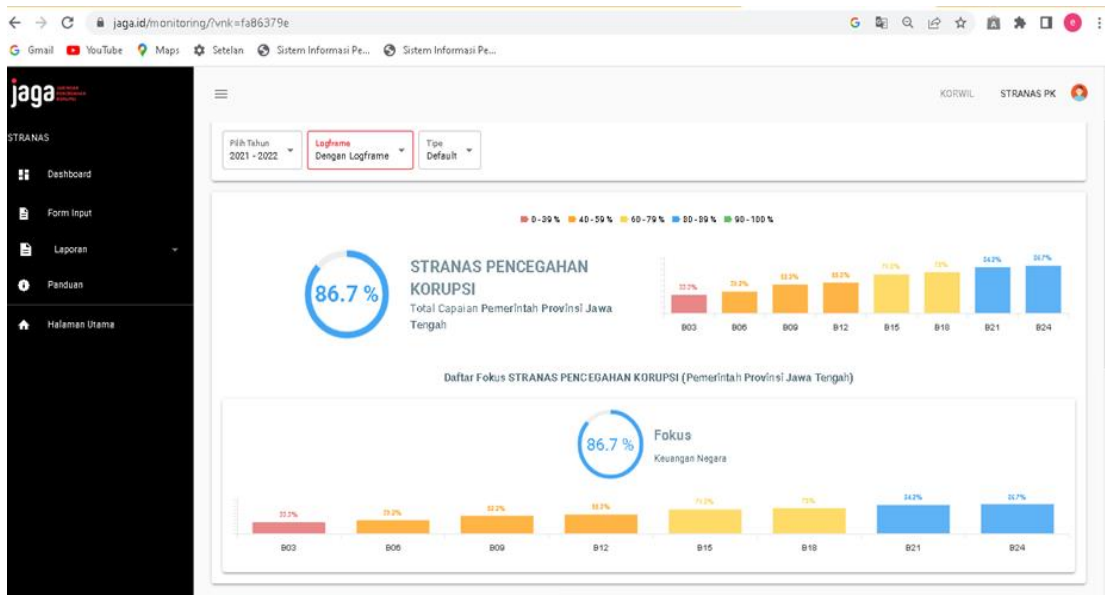
- a) Memberikan arahan tentang upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- b) Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) bukan hanya luaran kegiatan (*output*) dengan capaian yang terukur.
- c) Meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Stranas PK pelaporan tahun 2021-2022. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan data dukung dan melakukan pelaporan dalam aplikasi Stranas PK (jaga.id), yang terdiri dari: 1 (satu) fokus yaitu keuangan negara serta 2 (dua) aksi yaitu integrasi perencanaan penganggaran berbasis elektronik dan implementasi *e-payment* dan *e-katalog*. Sejumlah 2 (dua) aksi Stranas PK tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dipenuhi data dukungnya secara rutin setiap triwulan sampai dengan periode terakhir yaitu Triwulan VIII (B12) pada bulan Desember tahun 2022. Total capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada penilaian terakhir yaitu periode Triwulan VIII (B24) sebesar 86,7 % (delapan puluh enam koma tujuh persen). Aksi Stranas PK tersebut sesuai tupoksinya berada pada 4 Perangkat Daerah yaitu:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- d) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.1.
Total Capaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan VIII (B24)



Gambar 3.2.
Perincian Capaian Penilaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan VIII (B24)

No	Indikator	Instansi	Fokus	Akai	Output	Telapor	Terverifikasi	Nilai Verifikasi
1	Pembelian 5 komoditas baru pada katalog lokal Pemprov Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Implementasi E-payment dan E-katalog	Pemanfaatan e-katalog	✓	✓	100
2	Kemudahan data dan informasi pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan penganggaran atau penetapan anggaran penastusahaan dan pelaporan di Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah	✓	✓	70
3	Kemudahan data dan informasi yang disampaikan dan digunakan oleh K/L dan Pemda dalam seluruh tahapan perencanaan penganggaran	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah	✓	✓	50
4	10% pengadaan langsung di bawah 50jt dibayarkan melalui bank pengadaan dan dibayarkan dengan KPPD atau mekanisme e-payment lainnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Implementasi E-payment dan E-katalog	Termanfaatkannya Bank Pengadaan di 12 K/L dan 24 Provinsi	✓	✓	100
5	Matriks logframe berairumutan Akai PK, Output, Indikator, Baseline, Key Activity, dan K/L/D penanggung jawab E-Payment dan E-Katalog	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Implementasi E-payment dan E-katalog	Tersedianya matriks logframe Akai PK E-Payment dan E-Katalog	✓	✓	100
6	Matriks logframe berairumutan Akai PK, Output, Indikator, Baseline, Key Activity, dan K/L/D penanggung jawab Perencanaan Penganggaran	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Keuangan Negara	Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik	Tersedianya matriks logframe Akai PK Perencanaan Penganggaran	✓	✓	100

3.5 Inovasi

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk senantiasa mengembangkan kapasitas organisasi melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan (sistem manajemen), peraturan penunjang (regulasi), peningkatan kualitas apartur (*brainware dan skillware*), pemenuhan kebutuhan infrastruktur (*hardware*), serta sistem informasi (*software*) khususnya di bidang pengawasan.

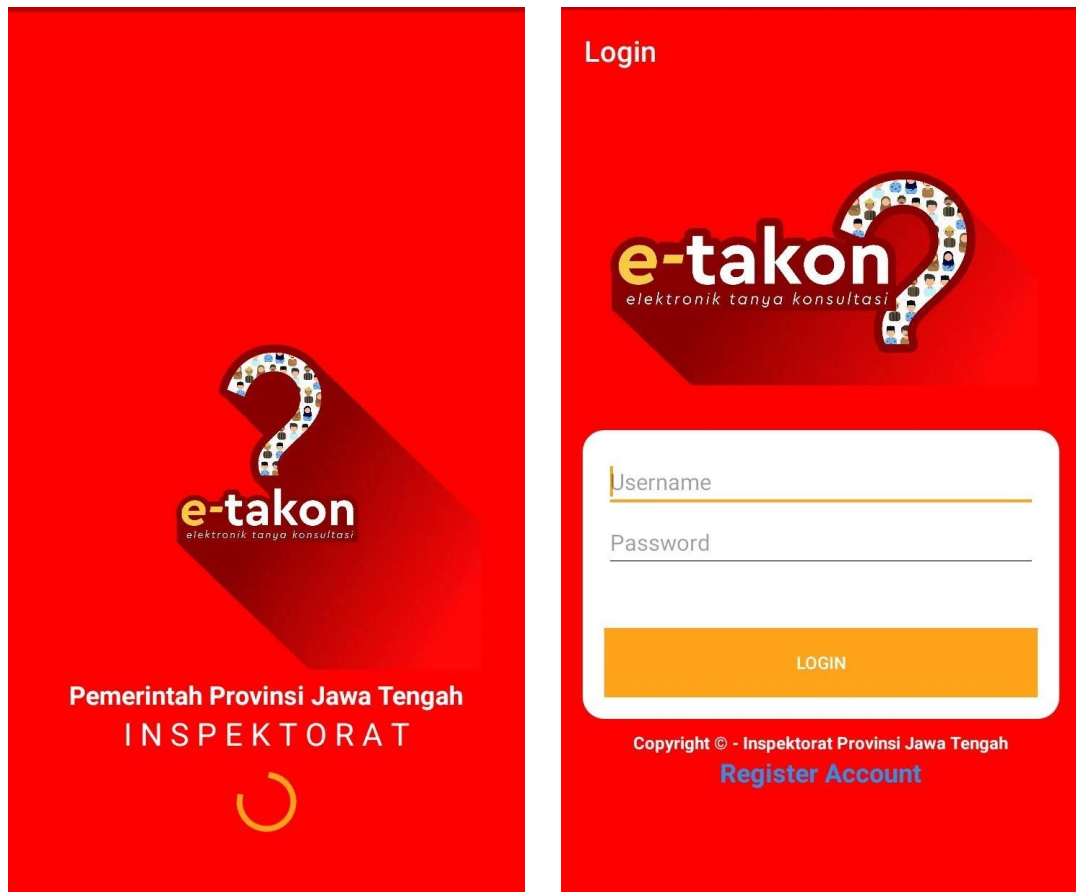
1. E-Takon (Elektronik Tanya Konsultasi)

E-Takon merupakan aplikasi berbasis android yang dikembangkan sebagai media *advistory activities/consulting activities* antara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan OPD Provinsi Jawa Tengah guna mendapat informasi lebih cepat dan efisien dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan. Jumlah konsultasi sejumlah 8 (tahun 2019), 21 (tahun 2020), 25 (tahun 2021) dan 9 (tahun 2022). Terdapat 15 area konsultasi, meliputi:

- a) DAK/BOS
- b) EKPPD
- c) Evaluasi Reformasi Birokrasi
- d) Gratifikasi
- e) Hibah/Bantuan Sosial
- f) Integritas
- g) Keuangan Daerah
- h) Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi
- i) LHKASN
- j) LHKPN
- k) LKJIP
- l) PPUPD
- m) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- n) Pejabat Fungsional Auditor
- o) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berikut tampilan Aplikasi E-Takon Inspektorat Provinsi Jawa Tengah:

Gambar 3.3.
Tampilan Aplikasi E-Takon

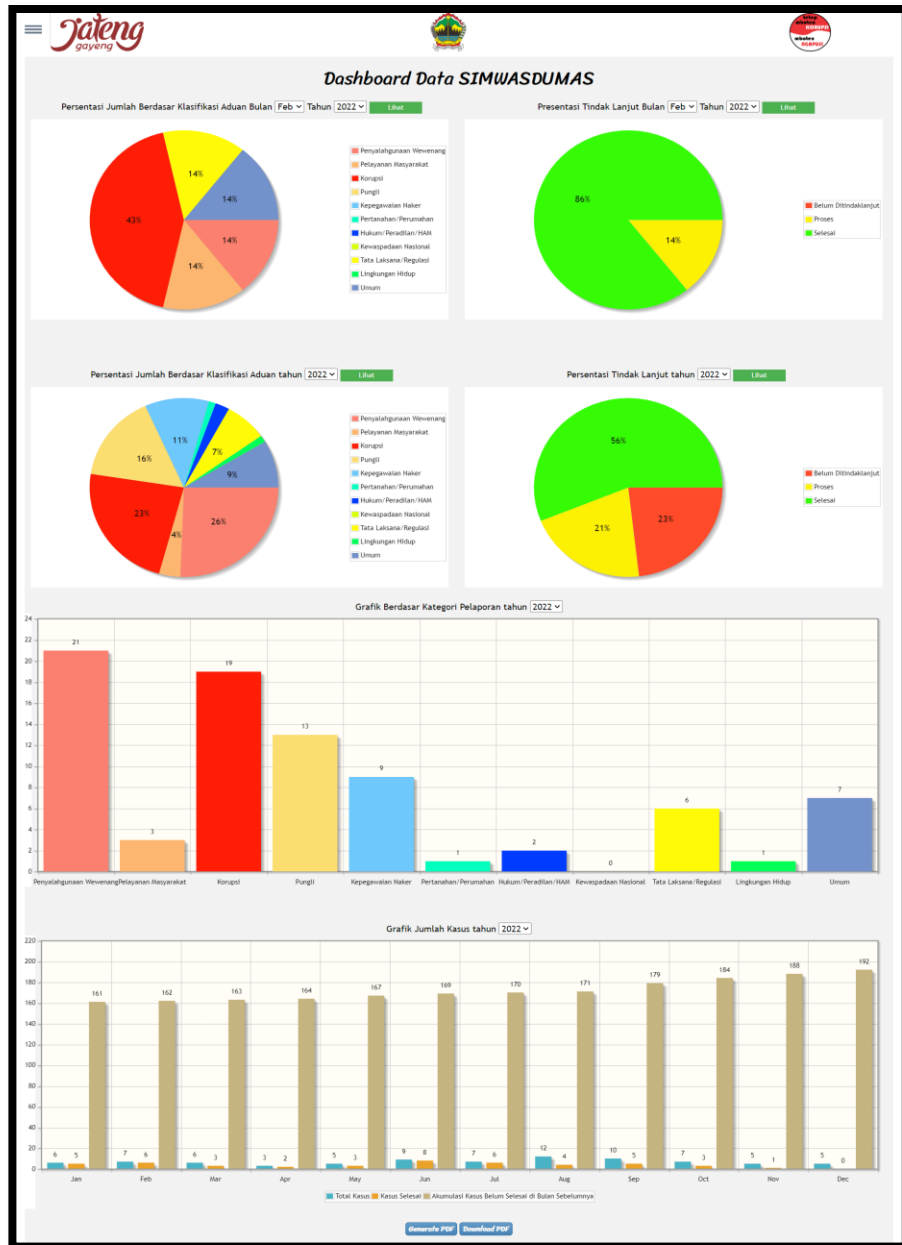


2. SIMWAS Online dan SIMWAS Dumas (Sistem Pengawasan)

SIMWAS Online dan SIMWAS Dumas merupakan aplikasi berbasis Web yang dikembangkan untuk mempermudah penginputan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang isinya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berikut tampilan Aplikasi SIMWAS Online dan Simwas Dumas Inspektorat Provinsi Jawa Tengah:

Gambar 3.4. Tampilan Aplikasi SIMWAS Dumas



Gambar 3.5. Tampilan Aplikasi SUMWAS Online

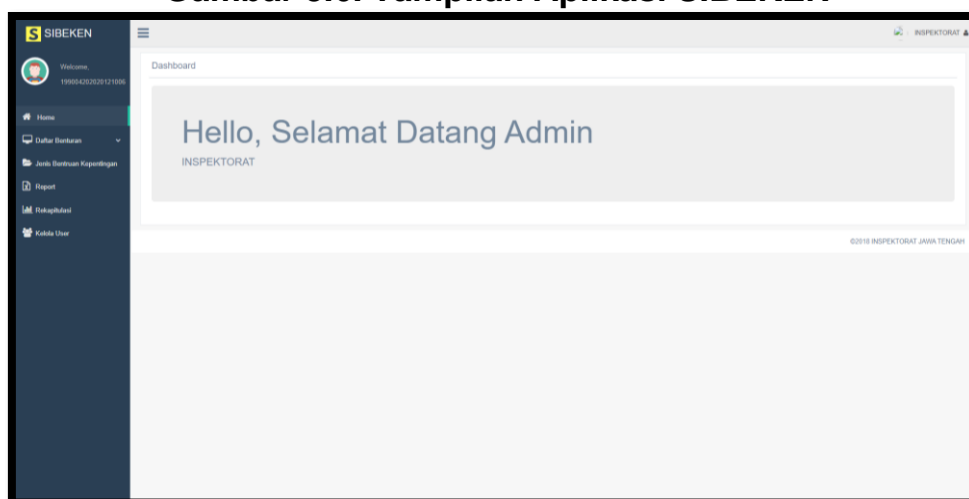


3. SIBEKEN (Sistem Informasi Benturan Kepentingan)

SIBEKEN merupakan aplikasi berbasis Web yang dikembangkan untuk memberikan akses kepada tiap-tiap SKPD untuk melakukan pendataan dan input benturan kepentingan yang ada di masing-masing SKPD. Sistem ini dimaksud untuk membangun kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di tiap-tiap SKPD dengan tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

Berikut tampilan Aplikasi SIBEKEN Inspektorat Provinsi Jawa Tengah:

Gambar 3.6. Tampilan Aplikasi SIBEKEN



3.5 Penghargaan-Penghargaan

1. TLHP Terbaik Nasional

Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Tercepat dan Terbaik dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri Tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Prestasi ini menjadi *quattrick*, karena sejak tahun 2016 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan 4 (empat) kali penghargaan serupa dari Menteri

Dalam Negeri secara berturut – turut. Hal ini menunjukkan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam memperbaiki Sistem Pemerintahan melalui pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan.

Tahun 2022 Itjen Kemendagri memutuskan untuk tidak memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, namun demikian capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kemendagri telah selesai (100%) ditindaklanjuti.

Gambar 3.7.
Penghargaan TLHP Terbaik Nasional dari Kemendagri



Gambar 3.8
Penghargaan Penyelesaian TLHP dari Kemendagri



2. PPID sebagai Perangkat Daerah Informatif

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meraih predikat Perangkat Daerah “Informatif” dalam acara Penganugerahan Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Predikat ini untuk kedua kalinya setelah sebelumnya tahun 2021 juga mendapatkan predikat “Informatif” tahun 2020 mendapatkan predikat “Menuju Informatif” dan tahun 2019 mendapat predikat “Cukup Informatif”. Penghargaan tersebut merupakan hasil kerja nyata Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam keterbukaan informasi kepada publik.

Penghargaan ini sangat penting bagi Inspektorat, sebagai aparat pengawasan, berani terbuka kepada publik atas kinerja yang selama ini telah dilakukan. Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban Perangkat Daerah sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap instansi pemerintah terutama di tengah arus informasi di era globalisasi sekarang ini.

Gambar 3.9
Piagam Penghargaan Kategori Informatif
dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Simpulan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya elemen Peran dan layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola” sebesar **100%** atau **kategori Baik**;
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP” sebesar **99,53%** atau **kategori Baik**;
3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah” sebesar **98,75%** atau **kategori Baik**;
4. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” sebesar **96,22%** atau **kategori Baik**;

5. Realisasi efisiensi anggaran belanja langsung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar **Rp290.932.041** atau **0,90%**.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Menyusun dan memonitoring Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang mengacu kepada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah guna perbaikan atas hasil Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP.
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan SDM APIP dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner* sehingga dapat mendukung fungsi APIP sebagai *early warning system*.
3. Mengoptimalkan POK sebagai sarana pengendalian internal kinerja tidak hanya memantau realisasi fisik dan capaian anggaran.
4. Meningkatkan pelaksanaan Monev atas TLHP APIP.
5. Membuat pohon kinerja sesuai Permen PAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah
6. Menyusun indikator kinerja utama individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2022 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Semarang, Februari 2023

Plt. INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH
Auditor Ahli Madya

DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731015 199703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 127 – 133, Telp. (024) 3517283 – 3517284 – 3556230 Fax. (024) 3514351

SEMARANG 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP**

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2022

Pihak Kedua,

GUBERNUR JAWA TENGAH



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pihak Pertama,

Plt. INSPEKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH
Inspektur Pembantu Khusus



DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731015 199703 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan			
1.	Meningkatkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Level 3 Penuh Kapabilitas APiP 2. Nilai 3,19 Maturitas SPIP	Level 3 Nilai 3,18
Sasaran			
1.1	Meningkatnya elemen Peran dan Layanan, Praktik Profesional, dan Struktur Tata Kelola	Level pada 3 elemen : 1. Elemen Peran dan Layanan; 2. Elemen Praktik Profesional; 3. Elemen Struktur Tata Kelola.	Level 3
1.2	Meningkatnya skor pada 3 (tiga) dari 5 (lima) unsur Nilai Maturitas SPIP	Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP : 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko, 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern.	Nilai 3,18
Tujuan			
2.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,35
Sasaran			
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87,35
2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.272.457.000	APBD
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.709.555.000	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.771.554.000	APBD

Semarang,


2022

GUBERNUR JAWA TENGAH



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Plt. INSPEKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH
Inspektur Pembantu Khusus



DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731015 199703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - BELANJA-FUNGSIONAL)

per 3 Januari 2023

SKPD : INSPEKTORAT
Pengguna Anggaran : DHONI WIDIANTO, S.Sos,MSi
Bendahara Pengeluaran : WORO ENDAH SEPTIARTI, SE
Bulan : Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.245.938.000	17.223.299.90	1.548.918.371	18.772.218.27	222.478.300	0	222.478.300	3.619.013.629	357.685.248	3.976.698.877	22.971.395.456	274.542.544
01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.246.000	0	0	0	0	0	0	76.727.094	3.680.250	80.407.344	80.407.344	7.838.656
01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.018.000	0	0	0	0	0	0	41.606.000	3.680.250	45.286.250	45.286.250	7.731.750
01.1.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.018.000	0	0	0	0	0	0	41.606.000	3.680.250	45.286.250	45.286.250	7.731.750
01.1.01.01.5.1.2.1	Belanja Barang	16.408.000	0	0	0	0	0	0	12.535.500	3.680.250	16.215.750	16.215.750	192.250
01.1.01.01.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	16.408.000	0	0	0	0	0	0	12.535.500	3.680.250	16.215.750	16.215.750	192.250
01.1.01.01.5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.108.000	0	0	0	0	0	0	6.108.000	0	6.108.000	6.108.000	0
01.1.01.01.5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.800.000	0	0	0	0	0	0	2.927.500	3.680.250	6.607.750	6.607.750	192.250
01.1.01.01.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0
01.1.01.01.5.1.2.2	Belanja Jasa	21.600.000	0	0	0	0	0	0	14.500.000	0	14.500.000	14.500.000	7.100.000
01.1.01.01.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	21.600.000	0	0	0	0	0	0	14.500.000	0	14.500.000	14.500.000	7.100.000
01.1.01.01.5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.600.000	0	0	0	0	0	0	14.500.000	0	14.500.000	14.500.000	7.100.000
01.1.01.01.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	15.010.000	0	0	0	0	0	0	14.570.500	0	14.570.500	14.570.500	439.500
01.1.01.01.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.010.000	0	0	0	0	0	0	14.570.500	0	14.570.500	14.570.500	439.500
01.1.01.01.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.010.000	0	0	0	0	0	0	14.570.500	0	14.570.500	14.570.500	439.500
01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.228.000	0	0	0	0	0	0	35.121.094	0	35.121.094	35.121.094	106.906

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
01.1.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.228.000	0	0	0	0	0	0	35.121.094	0	35.121.094	35.121.094	106.906
01.1.01.07.5.1.2.1	Belanja Barang	24.204.000	0	0	0	0	0	0	24.153.594	0	24.153.594	24.153.594	50.406
01.1.01.07.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	24.204.000	0	0	0	0	0	0	24.153.594	0	24.153.594	24.153.594	50.406
01.1.01.07.5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.144.000	0	0	0	0	0	0	3.144.000	0	3.144.000	3.144.000	0
01.1.01.07.5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.360.000	0	0	0	0	0	0	18.309.594	0	18.309.594	18.309.594	50.406
01.1.01.07.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0
01.1.01.07.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	11.024.000	0	0	0	0	0	0	10.967.500	0	10.967.500	10.967.500	56.500
01.1.01.07.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.024.000	0	0	0	0	0	0	10.967.500	0	10.967.500	10.967.500	56.500
01.1.01.07.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.024.000	0	0	0	0	0	0	10.967.500	0	10.967.500	10.967.500	56.500
01.1.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	18.963.559.000	17.223.299.908	1.548.918.371	18.772.218.279	0	0	0	0	0	0	18.772.218.279	191.340.721
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.963.559.000	17.223.299.908	1.548.918.371	18.772.218.279	0	0	0	0	0	0	18.772.218.279	191.340.721
01.1.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	18.963.559.000	17.223.299.908	1.548.918.371	18.772.218.279	0	0	0	0	0	0	18.772.218.279	191.340.721
01.1.02.01.5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.445.943.000	8.632.251.000	673.849.004	9.306.100.004	0	0	0	0	0	0	9.306.100.004	139.842.996
01.1.02.01.5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	6.638.000.000	6.116.884.380	469.313.500	6.586.197.880	0	0	0	0	0	0	6.586.197.880	51.802.120
01.1.02.01.5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	6.638.000.000	6.116.884.380	469.313.500	6.586.197.880	0	0	0	0	0	0	6.586.197.880	51.802.120
01.1.02.01.5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	625.000.000	572.395.380	44.204.800	616.600.180	0	0	0	0	0	0	616.600.180	8.399.820
01.1.02.01.5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	625.000.000	572.395.380	44.204.800	616.600.180	0	0	0	0	0	0	616.600.180	8.399.820
01.1.02.01.5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	125.000.000	99.900.000	6.660.000	106.560.000	0	0	0	0	0	0	106.560.000	18.440.000
01.1.02.01.5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	125.000.000	99.900.000	6.660.000	106.560.000	0	0	0	0	0	0	106.560.000	18.440.000
01.1.02.01.5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	806.900.000	730.190.000	59.040.000	789.230.000	0	0	0	0	0	0	789.230.000	17.670.000
01.1.02.01.5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	806.900.000	730.190.000	59.040.000	789.230.000	0	0	0	0	0	0	789.230.000	17.670.000
01.1.02.01.5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	150.000.000	131.255.000	9.585.000	140.840.000	0	0	0	0	0	0	140.840.000	9.160.000
01.1.02.01.5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	150.000.000	131.255.000	9.585.000	140.840.000	0	0	0	0	0	0	140.840.000	9.160.000
01.1.02.01.5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	380.000.000	345.370.980	26.433.300	371.804.280	0	0	0	0	0	0	371.804.280	8.195.720
01.1.02.01.5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	380.000.000	345.370.980	26.433.300	371.804.280	0	0	0	0	0	0	371.804.280	8.195.720

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
01.1.02.01.5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	67.000.000	46.482.209	4.034.138	50.516.347	0	0	0	0	0	0	50.516.347	16.483.653
01.1.02.01.5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	67.000.000	46.482.209	4.034.138	50.516.347	0	0	0	0	0	0	50.516.347	16.483.653
01.1.02.01.5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	153.000	88.046	7.288	95.334	0	0	0	0	0	0	95.334	57.666
01.1.02.01.5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	153.000	88.046	7.288	95.334	0	0	0	0	0	0	95.334	57.666
01.1.02.01.5.1.1.1.9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	595.000.000	540.082.851	50.065.568	590.148.419	0	0	0	0	0	0	590.148.419	4.851.581
01.1.02.01.5.1.1.1.9.1	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	595.000.000	540.082.851	50.065.568	590.148.419	0	0	0	0	0	0	590.148.419	4.851.581
01.1.02.01.5.1.1.1.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.755.000	12.400.539	1.126.352	13.526.891	0	0	0	0	0	0	13.526.891	228.109
01.1.02.01.5.1.1.1.10.1	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.755.000	12.400.539	1.126.352	13.526.891	0	0	0	0	0	0	13.526.891	228.109
01.1.02.01.5.1.1.1.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	45.135.000	37.201.615	3.379.058	40.580.673	0	0	0	0	0	0	40.580.673	4.554.327
01.1.02.01.5.1.1.1.11.1	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	45.135.000	37.201.615	3.379.058	40.580.673	0	0	0	0	0	0	40.580.673	4.554.327
01.1.02.01.5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.517.616.000	8.591.048.908	875.069.367	9.466.118.275	0	0	0	0	0	0	9.466.118.275	51.497.725
01.1.02.01.5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.517.616.000	8.591.048.908	875.069.367	9.466.118.275	0	0	0	0	0	0	9.466.118.275	51.497.725
01.1.02.01.5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.517.616.000	8.591.048.908	875.069.367	9.466.118.275	0	0	0	0	0	0	9.466.118.275	51.497.725
01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	172.600.000	0	0	0	119.278.300	0	119.278.300	52.366.150	0	52.366.150	171.644.450	955.550
01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	172.600.000	0	0	0	119.278.300	0	119.278.300	52.366.150	0	52.366.150	171.644.450	955.550
01.1.03.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172.600.000	0	0	0	119.278.300	0	119.278.300	52.366.150	0	52.366.150	171.644.450	955.550
01.1.03.02.5.1.2.2	Belanja Jasa	172.600.000	0	0	0	119.278.300	0	119.278.300	52.366.150	0	52.366.150	171.644.450	955.550
01.1.03.02.5.1.2.2.2	Belanja luran Jaminan/Asuransi	172.600.000	0	0	0	119.278.300	0	119.278.300	52.366.150	0	52.366.150	171.644.450	955.550
01.1.03.02.5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	172.600.000	0	0	0	119.278.300	0	119.278.300	52.366.150	0	52.366.150	171.644.450	955.550
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	321.907.000	0	0	0	0	0	0	276.468.480	35.873.500	312.341.980	312.341.980	9.565.020
01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	192.407.000	0	0	0	0	0	0	184.344.530	6.484.500	190.829.030	190.829.030	1.577.970
01.1.05.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	192.407.000	0	0	0	0	0	0	184.344.530	6.484.500	190.829.030	190.829.030	1.577.970
01.1.05.03.5.1.2.2	Belanja Jasa	8.750.000	0	0	0	0	0	0	6.650.000	2.100.000	8.750.000	8.750.000	0
01.1.05.03.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	8.750.000	0	0	0	0	0	0	6.650.000	2.100.000	8.750.000	8.750.000	0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
01.1.05.03.5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.750.000	0	0	0	0	0	0	650.000	2.100.000	2.750.000	2.750.000	0
01.1.05.03.5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0
01.1.05.03.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	183.657.000	0	0	0	0	0	0	177.694.530	4.384.500	182.079.030	182.079.030	1.577.970
01.1.05.03.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	183.657.000	0	0	0	0	0	0	177.694.530	4.384.500	182.079.030	182.079.030	1.577.970
01.1.05.03.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	151.544.000	0	0	0	0	0	0	146.048.910	4.384.500	150.433.410	150.433.410	1.110.590
01.1.05.03.5.1.2.4.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32.113.000	0	0	0	0	0	0	31.645.620	0	31.645.620	31.645.620	467.380
01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129.500.000	0	0	0	0	0	0	92.123.950	29.389.000	121.512.950	121.512.950	7.987.050
01.1.05.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	129.500.000	0	0	0	0	0	0	92.123.950	29.389.000	121.512.950	121.512.950	7.987.050
01.1.05.09.5.1.2.1	Belanja Barang	24.398.000	0	0	0	0	0	0	22.671.500	1.675.000	24.346.500	24.346.500	51.500
01.1.05.09.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	24.398.000	0	0	0	0	0	0	22.671.500	1.675.000	24.346.500	24.346.500	51.500
01.1.05.09.5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.198.000	0	0	0	0	0	0	6.571.500	1.575.000	8.146.500	8.146.500	51.500
01.1.05.09.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000	0	0	0	0	0	0	16.100.000	100.000	16.200.000	16.200.000	0
01.1.05.09.5.1.2.2	Belanja Jasa	67.392.000	0	0	0	0	0	0	65.598.950	0	65.598.950	65.598.950	1.793.050
01.1.05.09.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	20.250.000	0	0	0	0	0	0	18.500.000	0	18.500.000	18.500.000	1.750.000
01.1.05.09.5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.250.000	0	0	0	0	0	0	18.500.000	0	18.500.000	18.500.000	1.750.000
01.1.05.09.5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	0
01.1.05.09.5.1.2.2.4.202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	0
01.1.05.09.5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	44.542.000	0	0	0	0	0	0	44.498.950	0	44.498.950	44.498.950	43.050
01.1.05.09.5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	44.542.000	0	0	0	0	0	0	44.498.950	0	44.498.950	44.498.950	43.050
01.1.05.09.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	37.710.000	0	0	0	0	0	0	3.853.500	27.714.000	31.567.500	31.567.500	6.142.500
01.1.05.09.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.710.000	0	0	0	0	0	0	3.853.500	27.714.000	31.567.500	31.567.500	6.142.500
01.1.05.09.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.710.000	0	0	0	0	0	0	3.853.500	27.714.000	31.567.500	31.567.500	6.142.500
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.381.000	0	0	0	0	0	0	380.329.226	32.008.505	412.337.731	412.337.731	43.269

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
01.1.06.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
01.1.06.06.5.1.2.2	Belanja Jasa	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
01.1.06.06.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
01.1.06.06.5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	163.299.000	0	0	0	0	0	0	162.762.950	493.000	163.255.950	163.255.950	43.050
01.1.06.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	163.299.000	0	0	0	0	0	0	162.762.950	493.000	163.255.950	163.255.950	43.050
01.1.06.08.5.1.2.1	Belanja Barang	163.299.000	0	0	0	0	0	0	162.762.950	493.000	163.255.950	163.255.950	43.050
01.1.06.08.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	163.299.000	0	0	0	0	0	0	162.762.950	493.000	163.255.950	163.255.950	43.050
01.1.06.08.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.730.000	0	0	0	0	0	0	89.235.000	493.000	89.728.000	89.728.000	2.000
01.1.06.08.5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	73.569.000	0	0	0	0	0	0	73.527.950	0	73.527.950	73.527.950	41.050
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.082.000	0	0	0	0	0	0	212.566.276	31.515.505	244.081.781	244.081.781	219
01.1.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	244.082.000	0	0	0	0	0	0	212.566.276	31.515.505	244.081.781	244.081.781	219
01.1.06.09.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	244.082.000	0	0	0	0	0	0	212.566.276	31.515.505	244.081.781	244.081.781	219
01.1.06.09.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	244.082.000	0	0	0	0	0	0	212.566.276	31.515.505	244.081.781	244.081.781	219
01.1.06.09.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	244.082.000	0	0	0	0	0	0	212.566.276	31.515.505	244.081.781	244.081.781	219
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.550.000	0	0	0	103.200.000	0	103.200.000	29.449.500	3.296.700	32.746.200	135.946.200	603.800
01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.550.000	0	0	0	103.200.000	0	103.200.000	29.449.500	3.296.700	32.746.200	135.946.200	603.800
01.1.07.10.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.550.000	0	0	0	103.200.000	0	103.200.000	29.449.500	3.296.700	32.746.200	135.946.200	603.800
01.1.07.10.5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.350.000	0	0	0	0	0	0	29.449.500	3.296.700	32.746.200	32.746.200	603.800
01.1.07.10.5.2.2.5.1	Belanja Modal Alat Kantor	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	3.296.700	3.296.700	3.296.700	603.300
01.1.07.10.5.2.2.5.1.5	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	3.296.700	3.296.700	3.296.700	603.300
01.1.07.10.5.2.2.5.3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29.450.000	0	0	0	0	0	0	29.449.500	0	29.449.500	29.449.500	500
01.1.07.10.5.2.2.5.3.2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	14.930.000	0	0	0	0	0	0	14.929.500	0	14.929.500	14.929.500	500
01.1.07.10.5.2.2.5.3.4	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	14.520.000	0	0	0	0	0	0	14.520.000	0	14.520.000	14.520.000	0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
01.1.07.10.5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	103.200.000	0	0	0	103.200.000	0	103.200.000	0	0	0	103.200.000	0
01.1.07.10.5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	103.200.000	0	0	0	103.200.000	0	103.200.000	0	0	0	103.200.000	0
01.1.07.10.5.2.2.10.1.2	Belanja Modal Personal Computer	103.200.000	0	0	0	103.200.000	0	103.200.000	0	0	0	103.200.000	0
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.480.981.000	0	0	0	0	0	0	2.237.202.076	182.825.041	2.420.027.117	2.420.027.117	60.953.883
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	248.161.000	0	0	0	0	0	0	238.632.485	3.836.340	242.468.825	242.468.825	5.692.175
01.1.08.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	248.161.000	0	0	0	0	0	0	238.632.485	3.836.340	242.468.825	242.468.825	5.692.175
01.1.08.01.5.1.2.1	Belanja Barang	208.561.000	0	0	0	0	0	0	204.072.245	694.500	204.766.745	204.766.745	3.794.255
01.1.08.01.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	208.561.000	0	0	0	0	0	0	204.072.245	694.500	204.766.745	204.766.745	3.794.255
01.1.08.01.5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	115.976.000	0	0	0	0	0	0	115.880.245	0	115.880.245	115.880.245	95.755
01.1.08.01.5.1.2.1.1.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.900.000	0	0	0	0	0	0	21.899.500	0	21.899.500	21.899.500	500
01.1.08.01.5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.690.000	0	0	0	0	0	0	50.690.000	0	50.690.000	50.690.000	0
01.1.08.01.5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	19.995.000	0	0	0	0	0	0	15.602.500	694.500	16.297.000	16.297.000	3.698.000
01.1.08.01.5.1.2.2	Belanja Jasa	39.600.000	0	0	0	0	0	0	34.560.240	3.141.840	37.702.080	37.702.080	1.897.920
01.1.08.01.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	36.000.000	0	0	0	0	0	0	31.350.000	2.850.000	34.200.000	34.200.000	1.800.000
01.1.08.01.5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000	0	0	0	0	0	0	31.350.000	2.850.000	34.200.000	34.200.000	1.800.000
01.1.08.01.5.1.2.2.2	Belanja luran Jaminan Asuransi	3.600.000	0	0	0	0	0	0	3.210.240	291.840	3.502.080	3.502.080	97.920
01.1.08.01.5.1.2.2.2.5	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.254.000	114.000	1.368.000	1.368.000	32.000
01.1.08.01.5.1.2.2.2.6	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	800.000	0	0	0	0	0	0	702.240	63.840	766.080	766.080	33.920
01.1.08.01.5.1.2.2.2.7	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.254.000	114.000	1.368.000	1.368.000	32.000
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	681.900.000	0	0	0	0	0	0	594.661.896	49.548.633	644.210.529	644.210.529	37.689.471
01.1.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	681.900.000	0	0	0	0	0	0	594.661.896	49.548.633	644.210.529	644.210.529	37.689.471
01.1.08.02.5.1.2.1	Belanja Barang	681.900.000	0	0	0	0	0	0	594.661.896	49.548.633	644.210.529	644.210.529	37.689.471
01.1.08.02.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	681.900.000	0	0	0	0	0	0	594.661.896	49.548.633	644.210.529	644.210.529	37.689.471
01.1.08.02.5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	681.900.000	0	0	0	0	0	0	594.661.896	49.548.633	644.210.529	644.210.529	37.689.471

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.332.820.000	0	0	0	0	0	0	1.218.107.695	112.140.068	1.330.247.763	1.330.247.763	2.572.237
01.1.08.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.332.820.000	0	0	0	0	0	0	1.218.107.695	112.140.068	1.330.247.763	1.330.247.763	2.572.237
01.1.08.03.5.1.2.2	Belanja Jasa	1.302.820.000	0	0	0	0	0	0	1.191.460.851	108.794.104	1.300.254.955	1.300.254.955	2.565.045
01.1.08.03.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	1.245.870.000	0	0	0	0	0	0	1.140.344.819	104.147.192	1.244.492.011	1.244.492.011	1.377.989
01.1.08.03.5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	544.560.000	0	0	0	0	0	0	499.180.000	45.380.000	544.560.000	544.560.000	0
01.1.08.03.5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	343.710.000	0	0	0	0	0	0	314.645.379	28.760.487	343.405.866	343.405.866	304.134
01.1.08.03.5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	349.200.000	0	0	0	0	0	0	319.776.440	29.378.705	349.155.145	349.155.145	44.855
01.1.08.03.5.1.2.2.1.51	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	8.400.000	0	0	0	0	0	0	6.743.000	628.000	7.371.000	7.371.000	1.029.000
01.1.08.03.5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	56.950.000	0	0	0	0	0	0	51.116.032	4.646.912	55.762.944	55.762.944	1.187.056
01.1.08.03.5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.200.000	0	0	0	0	0	0	19.967.200	1.815.200	21.782.400	21.782.400	417.600
01.1.08.03.5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	13.050.000	0	0	0	0	0	0	11.264.032	1.016.512	12.280.544	12.280.544	769.456
01.1.08.03.5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.700.000	0	0	0	0	0	0	19.884.800	1.815.200	21.700.000	21.700.000	0
01.1.08.03.5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	30.000.000	0	0	0	0	0	0	26.646.844	3.345.964	29.992.808	29.992.808	7.192
01.1.08.03.5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000	0	0	0	0	0	0	26.646.844	3.345.964	29.992.808	29.992.808	7.192
01.1.08.03.5.1.2.3.2.120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	30.000.000	0	0	0	0	0	0	26.646.844	3.345.964	29.992.808	29.992.808	7.192
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.100.000	0	0	0	0	0	0	185.800.000	17.300.000	203.100.000	203.100.000	15.000.000
01.1.08.04.5.1.1	Belanja Pegawai	218.100.000	0	0	0	0	0	0	185.800.000	17.300.000	203.100.000	203.100.000	15.000.000
01.1.08.04.5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	218.100.000	0	0	0	0	0	0	185.800.000	17.300.000	203.100.000	203.100.000	15.000.000
01.1.08.04.5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	218.100.000	0	0	0	0	0	0	185.800.000	17.300.000	203.100.000	203.100.000	15.000.000
01.1.08.04.5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	203.700.000	0	0	0	0	0	0	172.600.000	16.100.000	188.700.000	188.700.000	15.000.000
01.1.08.04.5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.400.000	0	0	0	0	0	0	13.200.000	1.200.000	14.400.000	14.400.000	0
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.714.000	0	0	0	0	0	0	566.471.103	100.001.252	666.472.355	666.472.355	3.241.645

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.830.000	0	0	0	0	0	0	262.501.439	33.139.500	295.640.939	295.640.939	2.189.061
01.1.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	297.830.000	0	0	0	0	0	0	262.501.439	33.139.500	295.640.939	295.640.939	2.189.061
01.1.09.02.5.1.2.1	Belanja Barang	92.060.000	0	0	0	0	0	0	78.000.000	14.000.000	92.000.000	92.000.000	60.000
01.1.09.02.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	92.060.000	0	0	0	0	0	0	78.000.000	14.000.000	92.000.000	92.000.000	60.000
01.1.09.02.5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	92.060.000	0	0	0	0	0	0	78.000.000	14.000.000	92.000.000	92.000.000	60.000
01.1.09.02.5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	205.770.000	0	0	0	0	0	0	184.501.439	19.139.500	203.640.939	203.640.939	2.129.061
01.1.09.02.5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	205.770.000	0	0	0	0	0	0	184.501.439	19.139.500	203.640.939	203.640.939	2.129.061
01.1.09.02.5.1.2.3.2.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.550.000	0	0	0	0	0	0	20.608.900	4.872.500	25.481.400	25.481.400	2.068.600
01.1.09.02.5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	178.220.000	0	0	0	0	0	0	163.892.539	14.267.000	178.159.539	178.159.539	60.461
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.594.000	0	0	0	0	0	0	206.646.126	34.404.962	241.051.088	241.051.088	542.912
01.1.09.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	241.594.000	0	0	0	0	0	0	206.646.126	34.404.962	241.051.088	241.051.088	542.912
01.1.09.09.5.1.2.1	Belanja Barang	8.289.000	0	0	0	0	0	0	8.214.799	0	8.214.799	8.214.799	74.201
01.1.09.09.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	8.289.000	0	0	0	0	0	0	8.214.799	0	8.214.799	8.214.799	74.201
01.1.09.09.5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	8.289.000	0	0	0	0	0	0	8.214.799	0	8.214.799	8.214.799	74.201
01.1.09.09.5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	233.305.000	0	0	0	0	0	0	198.431.327	34.404.962	232.836.289	232.836.289	468.711
01.1.09.09.5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157.540.000	0	0	0	0	0	0	130.329.027	26.906.402	157.235.429	157.235.429	304.571
01.1.09.09.5.1.2.3.2.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	157.540.000	0	0	0	0	0	0	130.329.027	26.906.402	157.235.429	157.235.429	304.571
01.1.09.09.5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.765.000	0	0	0	0	0	0	26.657.630	2.953.000	29.610.630	29.610.630	154.370
01.1.09.09.5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	29.765.000	0	0	0	0	0	0	26.657.630	2.953.000	29.610.630	29.610.630	154.370
01.1.09.09.5.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.000.000	0	0	0	0	0	0	41.444.670	4.545.560	45.990.230	45.990.230	9.770

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
01.1.09.09.5.1.2.3.4.123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	23.000.000	0	0	0	0	0	0	21.002.060	1.997.000	22.999.060	22.999.060	940
01.1.09.09.5.1.2.3.4.126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	23.000.000	0	0	0	0	0	0	20.442.610	2.548.560	22.991.170	22.991.170	8.830
01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.290.000	0	0	0	0	0	0	97.323.538	32.456.790	129.780.328	129.780.328	509.672
01.1.09.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.290.000	0	0	0	0	0	0	97.323.538	32.456.790	129.780.328	129.780.328	509.672
01.1.09.10.5.1.2.1	Belanja Barang	16.510.000	0	0	0	0	0	0	13.900.468	2.548.700	16.449.168	16.449.168	60.832
01.1.09.10.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	16.510.000	0	0	0	0	0	0	13.900.468	2.548.700	16.449.168	16.449.168	60.832
01.1.09.10.5.1.2.1.1.2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	13.110.000	0	0	0	0	0	0	11.940.468	1.148.700	13.089.168	13.089.168	20.832
01.1.09.10.5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.940.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.400.000	2.900.000	2.900.000	40.000
01.1.09.10.5.1.2.1.1.10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	460.000	0	0	0	0	0	0	460.000	0	460.000	460.000	0
01.1.09.10.5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	113.780.000	0	0	0	0	0	0	83.423.070	29.908.090	113.331.160	113.331.160	448.840
01.1.09.10.5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.780.000	0	0	0	0	0	0	83.423.070	29.908.090	113.331.160	113.331.160	448.840
01.1.09.10.5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	12.882.000	0	0	0	0	0	0	12.780.000	0	12.780.000	12.780.000	102.000
01.1.09.10.5.1.2.3.2.137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.110.110	0	2.110.110	2.110.110	89.890
01.1.09.10.5.1.2.3.2.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	98.698.000	0	0	0	0	0	0	68.532.960	29.908.090	98.441.050	98.441.050	256.950
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.168.200.000	0	0	0	0	0	0	952.267.011	215.755.333	1.168.022.344	1.168.022.344	177.656
02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.168.200.000	0	0	0	0	0	0	952.267.011	215.755.333	1.168.022.344	1.168.022.344	177.656
02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.168.200.000	0	0	0	0	0	0	952.267.011	215.755.333	1.168.022.344	1.168.022.344	177.656
02.1.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.168.200.000	0	0	0	0	0	0	952.267.011	215.755.333	1.168.022.344	1.168.022.344	177.656
02.1.02.02.5.1.2.1	Belanja Barang	250.000	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000	248.000	2.000
02.1.02.02.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	250.000	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000	248.000	2.000
02.1.02.02.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000	248.000	2.000
02.1.02.02.5.1.2.2	Belanja Jasa	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
02.1.02.02.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
02.1.02.02.5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
02.1.02.02.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	1.166.150.000	0	0	0	0	0	0	952.267.011	213.707.333	1.165.974.344	1.165.974.344	175.656
02.1.02.02.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.166.150.000	0	0	0	0	0	0	952.267.011	213.707.333	1.165.974.344	1.165.974.344	175.656
02.1.02.02.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.166.150.000	0	0	0	0	0	0	952.267.011	213.707.333	1.165.974.344	1.165.974.344	175.656
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.868.199.000	0	0	0	0	0	0	1.655.726.488	205.226.900	1.860.953.388	1.860.953.388	7.245.612
03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.868.199.000	0	0	0	0	0	0	1.655.726.488	205.226.900	1.860.953.388	1.860.953.388	7.245.612
03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	609.706.000	0	0	0	0	0	0	593.567.675	12.379.300	605.946.975	605.946.975	3.759.025
03.1.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	609.706.000	0	0	0	0	0	0	593.567.675	12.379.300	605.946.975	605.946.975	3.759.025
03.1.02.02.5.1.2.1	Belanja Barang	33.335.000	0	0	0	0	0	0	23.810.000	8.305.300	32.115.300	32.115.300	1.219.700
03.1.02.02.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	33.335.000	0	0	0	0	0	0	23.810.000	8.305.300	32.115.300	32.115.300	1.219.700
03.1.02.02.5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.070.000	0	0	0	0	0	0	0	3.070.000	3.070.000	3.070.000	0
03.1.02.02.5.1.2.1.1.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.990.000	0	0	0	0	0	0	0	3.885.300	3.885.300	3.885.300	104.700
03.1.02.02.5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
03.1.02.02.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.275.000	0	0	0	0	0	0	23.810.000	1.350.000	25.160.000	25.160.000	115.000
03.1.02.02.5.1.2.2	Belanja Jasa	13.750.000	0	0	0	0	0	0	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000	2.050.000
03.1.02.02.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	13.750.000	0	0	0	0	0	0	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000	2.050.000
03.1.02.02.5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.000.000	0	0	0	0	0	0	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000	1.300.000
03.1.02.02.5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
03.1.02.02.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	562.621.000	0	0	0	0	0	0	558.057.675	4.074.000	562.131.675	562.131.675	489.325
03.1.02.02.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	562.621.000	0	0	0	0	0	0	558.057.675	4.074.000	562.131.675	562.131.675	489.325
03.1.02.02.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	562.621.000	0	0	0	0	0	0	558.057.675	4.074.000	562.131.675	562.131.675	489.325

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	965.713.000	0	0	0	0	0	0	795.863.253	167.177.600	963.040.853	963.040.853	2.672.147
03.1.02.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	965.713.000	0	0	0	0	0	0	795.863.253	167.177.600	963.040.853	963.040.853	2.672.147
03.1.02.03.5.1.2.1	Belanja Barang	25.880.000	0	0	0	0	0	0	25.858.000	0	25.858.000	25.858.000	22.000
03.1.02.03.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	25.880.000	0	0	0	0	0	0	25.858.000	0	25.858.000	25.858.000	22.000
03.1.02.03.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.880.000	0	0	0	0	0	0	25.858.000	0	25.858.000	25.858.000	22.000
03.1.02.03.5.1.2.2	Belanja Jasa	46.400.000	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0	44.000.000	44.000.000	2.400.000
03.1.02.03.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	46.400.000	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0	44.000.000	44.000.000	2.400.000
03.1.02.03.5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.400.000	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0	44.000.000	44.000.000	2.400.000
03.1.02.03.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	893.433.000	0	0	0	0	0	0	726.005.253	167.177.600	893.182.853	893.182.853	250.147
03.1.02.03.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	893.433.000	0	0	0	0	0	0	726.005.253	167.177.600	893.182.853	893.182.853	250.147
03.1.02.03.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	893.433.000	0	0	0	0	0	0	726.005.253	167.177.600	893.182.853	893.182.853	250.147
03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	292.780.000	0	0	0	0	0	0	266.295.560	25.670.000	291.965.560	291.965.560	814.440
03.1.02.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	292.780.000	0	0	0	0	0	0	266.295.560	25.670.000	291.965.560	291.965.560	814.440
03.1.02.04.5.1.2.1	Belanja Barang	28.090.000	0	0	0	0	0	0	28.087.000	0	28.087.000	28.087.000	3.000
03.1.02.04.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	28.090.000	0	0	0	0	0	0	28.087.000	0	28.087.000	28.087.000	3.000
03.1.02.04.5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000	750.000	0
03.1.02.04.5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0
03.1.02.04.5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0
03.1.02.04.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.840.000	0	0	0	0	0	0	22.837.000	0	22.837.000	22.837.000	3.000
03.1.02.04.5.1.2.2	Belanja Jasa	105.000.000	0	0	0	0	0	0	89.600.000	15.000.000	104.600.000	104.600.000	400.000
03.1.02.04.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	105.000.000	0	0	0	0	0	0	89.600.000	15.000.000	104.600.000	104.600.000	400.000
03.1.02.04.5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	400.000
03.1.02.04.5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	96.600.000	0	0	0	0	0	0	81.600.000	15.000.000	96.600.000	96.600.000	0
03.1.02.04.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	159.690.000	0	0	0	0	0	0	148.608.560	10.670.000	159.278.560	159.278.560	411.440
03.1.02.04.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	159.690.000	0	0	0	0	0	0	148.608.560	10.670.000	159.278.560	159.278.560	411.440

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
03.1.02.04.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159.690.000	0	0	0	0	0	0	148.608.560	10.670.000	159.278.560	159.278.560	411.440
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.515.810.000	0	0	0	0	0	0	1.282.700.263	230.258.610	1.512.958.873	1.512.958.873	2.851.127
02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.515.810.000	0	0	0	0	0	0	1.282.700.263	230.258.610	1.512.958.873	1.512.958.873	2.851.127
02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	493.500.000	0	0	0	0	0	0	413.046.958	79.793.690	492.840.648	492.840.648	659.352
02.1.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	493.500.000	0	0	0	0	0	0	413.046.958	79.793.690	492.840.648	492.840.648	659.352
02.1.01.01.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	493.500.000	0	0	0	0	0	0	413.046.958	79.793.690	492.840.648	492.840.648	659.352
02.1.01.01.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	493.500.000	0	0	0	0	0	0	413.046.958	79.793.690	492.840.648	492.840.648	659.352
02.1.01.01.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	493.500.000	0	0	0	0	0	0	413.046.958	79.793.690	492.840.648	492.840.648	659.352
02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	46.250.000	0	0	0	0	0	0	13.950.000	31.490.820	45.440.820	45.440.820	809.180
02.1.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.250.000	0	0	0	0	0	0	13.950.000	31.490.820	45.440.820	45.440.820	809.180
02.1.01.03.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	46.250.000	0	0	0	0	0	0	13.950.000	31.490.820	45.440.820	45.440.820	809.180
02.1.01.03.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.250.000	0	0	0	0	0	0	13.950.000	31.490.820	45.440.820	45.440.820	809.180
02.1.01.03.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.250.000	0	0	0	0	0	0	13.950.000	31.490.820	45.440.820	45.440.820	809.180
02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	976.060.000	0	0	0	0	0	0	855.703.305	118.974.100	974.677.405	974.677.405	1.382.595
02.1.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	976.060.000	0	0	0	0	0	0	855.703.305	118.974.100	974.677.405	974.677.405	1.382.595
02.1.01.05.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	976.060.000	0	0	0	0	0	0	855.703.305	118.974.100	974.677.405	974.677.405	1.382.595
02.1.01.05.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	976.060.000	0	0	0	0	0	0	855.703.305	118.974.100	974.677.405	974.677.405	1.382.595
02.1.01.05.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	976.060.000	0	0	0	0	0	0	855.703.305	118.974.100	974.677.405	974.677.405	1.382.595
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.476.600.000	0	0	0	0	0	0	1.178.025.648	298.268.000	1.476.293.648	1.476.293.648	306.352
02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	780.000.000	0	0	0	0	0	0	590.289.375	189.538.000	779.827.375	779.827.375	172.625
02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	780.000.000	0	0	0	0	0	0	590.289.375	189.538.000	779.827.375	779.827.375	172.625
02.1.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	780.000.000	0	0	0	0	0	0	590.289.375	189.538.000	779.827.375	779.827.375	172.625
02.1.01.04.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	780.000.000	0	0	0	0	0	0	590.289.375	189.538.000	779.827.375	779.827.375	172.625
02.1.01.04.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	780.000.000	0	0	0	0	0	0	590.289.375	189.538.000	779.827.375	779.827.375	172.625
02.1.01.04.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	780.000.000	0	0	0	0	0	0	590.289.375	189.538.000	779.827.375	779.827.375	172.625

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	696.600.000	0	0	0	0	0	0	587.736.273	108.730.000	696.466.273	696.466.273	133.727
02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	696.600.000	0	0	0	0	0	0	587.736.273	108.730.000	696.466.273	696.466.273	133.727
02.1.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	696.600.000	0	0	0	0	0	0	587.736.273	108.730.000	696.466.273	696.466.273	133.727
02.1.02.02.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	696.600.000	0	0	0	0	0	0	587.736.273	108.730.000	696.466.273	696.466.273	133.727
02.1.02.02.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	696.600.000	0	0	0	0	0	0	587.736.273	108.730.000	696.466.273	696.466.273	133.727
02.1.02.02.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	696.600.000	0	0	0	0	0	0	587.736.273	108.730.000	696.466.273	696.466.273	133.727
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.392.914.000	0	0	0	0	0	0	1.235.384.489	153.852.440	1.389.236.929	1.389.236.929	3.677.071
02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.392.914.000	0	0	0	0	0	0	1.235.384.489	153.852.440	1.389.236.929	1.389.236.929	3.677.071
02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.392.914.000	0	0	0	0	0	0	1.235.384.489	153.852.440	1.389.236.929	1.389.236.929	3.677.071
02.1.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.392.914.000	0	0	0	0	0	0	1.235.384.489	153.852.440	1.389.236.929	1.389.236.929	3.677.071
02.1.01.01.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	1.392.914.000	0	0	0	0	0	0	1.235.384.489	153.852.440	1.389.236.929	1.389.236.929	3.677.071
02.1.01.01.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.392.914.000	0	0	0	0	0	0	1.235.384.489	153.852.440	1.389.236.929	1.389.236.929	3.677.071
02.1.01.01.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.392.914.000	0	0	0	0	0	0	1.235.384.489	153.852.440	1.389.236.929	1.389.236.929	3.677.071
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	644.437.000	0	0	0	0	0	0	524.538.150	119.825.020	644.363.170	644.363.170	73.830
02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	644.437.000	0	0	0	0	0	0	524.538.150	119.825.020	644.363.170	644.363.170	73.830
02.1.01.07	Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil	644.437.000	0	0	0	0	0	0	524.538.150	119.825.020	644.363.170	644.363.170	73.830
02.1.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	644.437.000	0	0	0	0	0	0	524.538.150	119.825.020	644.363.170	644.363.170	73.830
02.1.01.07.5.1.2.1	Belanja Barang	75.153.000	0	0	0	0	0	0	74.252.000	895.000	75.147.000	75.147.000	6.000
02.1.01.07.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	75.153.000	0	0	0	0	0	0	74.252.000	895.000	75.147.000	75.147.000	6.000
02.1.01.07.5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.785.000	0	0	0	0	0	0	8.784.000	0	8.784.000	8.784.000	1.000
02.1.01.07.5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.168.000	0	0	0	0	0	0	12.168.000	0	12.168.000	12.168.000	0
02.1.01.07.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.200.000	0	0	0	0	0	0	53.300.000	895.000	54.195.000	54.195.000	5.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
02.1.01.07.5.1.2.2	Belanja Jasa	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0
02.1.01.07.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0
02.1.01.07.5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0
02.1.01.07.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	563.784.000	0	0	0	0	0	0	444.786.150	118.930.020	563.716.170	563.716.170	67.830
02.1.01.07.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	563.784.000	0	0	0	0	0	0	444.786.150	118.930.020	563.716.170	563.716.170	67.830
02.1.01.07.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	563.784.000	0	0	0	0	0	0	444.786.150	118.930.020	563.716.170	563.716.170	67.830
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	865.468.000	0	0	0	0	0	0	731.519.651	131.890.500	863.410.151	863.410.151	2.057.849
03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	622.574.000	0	0	0	0	0	0	532.797.239	88.020.000	620.817.239	620.817.239	1.756.761
03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	622.574.000	0	0	0	0	0	0	532.797.239	88.020.000	620.817.239	620.817.239	1.756.761
03.1.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	622.574.000	0	0	0	0	0	0	532.797.239	88.020.000	620.817.239	620.817.239	1.756.761
03.1.01.02.5.1.2.1	Belanja Barang	54.417.000	0	0	0	0	0	0	44.331.000	10.064.500	54.395.500	54.395.500	21.500
03.1.01.02.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	54.417.000	0	0	0	0	0	0	44.331.000	10.064.500	54.395.500	54.395.500	21.500
03.1.01.02.5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	27.017.000	0	0	0	0	0	0	21.370.000	5.647.000	27.017.000	27.017.000	0
03.1.01.02.5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.300.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	292.500	7.292.500	7.292.500	7.500
03.1.01.02.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.100.000	0	0	0	0	0	0	15.961.000	4.125.000	20.086.000	20.086.000	14.000
03.1.01.02.5.1.2.2	Belanja Jasa	56.600.000	0	0	0	0	0	0	30.800.000	24.200.000	55.000.000	55.000.000	1.600.000
03.1.01.02.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	53.000.000	0	0	0	0	0	0	28.200.000	23.200.000	51.400.000	51.400.000	1.600.000
03.1.01.02.5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.000.000	0	0	0	0	0	0	28.200.000	23.200.000	51.400.000	51.400.000	1.600.000
03.1.01.02.5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	1.000.000	3.600.000	3.600.000	0
03.1.01.02.5.1.2.2.4.202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	3.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	1.000.000	3.600.000	3.600.000	0
03.1.01.02.5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	511.557.000	0	0	0	0	0	0	457.666.239	53.755.500	511.421.739	511.421.739	135.261
03.1.01.02.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	511.557.000	0	0	0	0	0	0	457.666.239	53.755.500	511.421.739	511.421.739	135.261

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
03.1.01.02.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	511.557.000	0	0	0	0	0	0	457.666.239	53.755.500	511.421.739	511.421.739	135.261
03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	242.894.000	0	0	0	0	0	0	198.722.412	43.870.500	242.592.912	242.592.912	301.088
03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	92.624.000	0	0	0	0	0	0	48.685.500	43.870.500	92.556.000	92.556.000	68.000
03.1.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	92.624.000	0	0	0	0	0	0	48.685.500	43.870.500	92.556.000	92.556.000	68.000
03.1.02.01.5.1.2.1	Belanja Barang	7.473.000	0	0	0	0	0	0	4.339.000	3.123.000	7.462.000	7.462.000	11.000
03.1.02.01.5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	7.473.000	0	0	0	0	0	0	4.339.000	3.123.000	7.462.000	7.462.000	11.000
03.1.02.01.5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	798.000	0	0	0	0	0	0	0	798.000	798.000	798.000	0
03.1.02.01.5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.300.000	0	0	0	0	0	0	1.189.000	2.100.000	3.289.000	3.289.000	11.000
03.1.02.01.5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.375.000	0	0	0	0	0	0	3.150.000	225.000	3.375.000	3.375.000	0
03.1.02.01.5.1.2.2	Belanja Jasa	25.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	0
03.1.02.01.5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	25.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	0
03.1.02.01.5.1.2.2.1.36	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	25.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	0
03.1.02.01.5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	60.151.000	0	0	0	0	0	0	41.346.500	18.747.500	60.094.000	60.094.000	57.000
03.1.02.01.5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.151.000	0	0	0	0	0	0	41.346.500	18.747.500	60.094.000	60.094.000	57.000
03.1.02.01.5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.151.000	0	0	0	0	0	0	41.346.500	18.747.500	60.094.000	60.094.000	57.000
03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	150.270.000	0	0	0	0	0	0	150.036.912	0	150.036.912	150.036.912	233.088
03.1.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.270.000	0	0	0	0	0	0	150.036.912	0	150.036.912	150.036.912	233.088
03.1.02.02.5.1.2.2	Belanja Jasa	150.270.000	0	0	0	0	0	0	150.036.912	0	150.036.912	150.036.912	233.088
03.1.02.02.5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.270.000	0	0	0	0	0	0	150.036.912	0	150.036.912	150.036.912	233.088
03.1.02.02.5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	150.270.000	0	0	0	0	0	0	150.036.912	0	150.036.912	150.036.912	233.088
	Jumlah	32.177.566.000	17.223.299.908	1.548.918.371	18.772.218.279	222.478.300	0	222.478.300	11.179.175.329	1.712.762.051	12.891.937.380	31.886.633.959	290.932.041
	Penerimaan :												
	SP2D		17.232.195.528	1.548.918.371	18.781.113.899	222.478.300	0	222.478.300	13.762.112.873	1.592.173.043	15.354.285.916	34.357.878.115	
	Potongan Pajak												
	PPh Pasal 21		525.841.117	181.378.505	707.219.622	0	0	0	41.495.000	5.925.000	47.420.000	754.639.622	
	PPh Pasal 22		0	0	0	1.407.273	0	1.407.273	2.377.382	206.766	2.584.148	3.991.421	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran(Rp)	SPJ- LS Gaji(Rp)			SPJ- LS Barang & Jasa(Rp)			SPJ- GU/TU(Rp)			Jumlah SPJ(LS+ GU/TU) s.d. Bulan ini(Rp)	Sisa Pagu Anggaran(Rp)
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14
	PPH Pasal 23		0	0	0	0	0	0	13.112.851	1.496.179	14.609.030	14.609.030	
	PPH Pasal 26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PPH Final		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PPN Dalam Negeri		0	0	0	9.381.818	0	9.381.818	68.352.268	8.637.810	76.990.078	86.371.896	
	PPN Impor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PPn BM Dalam Negeri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PPn BM Impor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Contra Post		8.895.620	0	8.895.620	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000	10.545.620	
	TU Nihil		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penyesuaian BOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan		17.766.932.26	1.730.296.876	19.497.229.14	233.267.391	0	233.267.391	13.889.100.37	1.608.438.798	15.497.539.17	35.228.035.704	
			5		1				4		2		
	Pengeluaran :												
	SPJ (LS + GU/TU)		17.232.195.52	1.548.918.371	18.781.113.89	222.478.300	0	222.478.300	11.180.825.32	1.712.762.051	12.893.587.38	31.897.179.579	
			8		9				9		0		
	Penyetoran Pajak												
	PPH Pasal 21		525.841.117	181.378.505	707.219.622	0	0	0	41.495.000	5.925.000	47.420.000	754.639.622	
	PPH Pasal 22		0	0	0	1.407.273	0	1.407.273	2.377.382	206.766	2.584.148	3.991.421	
	PPH Pasal 23		0	0	0	0	0	0	13.112.851	1.496.179	14.609.030	14.609.030	
	PPH Pasal 26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PPH Final		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PPN Dalam Negeri		0	0	0	9.381.818	0	9.381.818	68.352.268	8.637.810	76.990.078	86.371.896	
	PPN Impor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PPn BM Dalam Negeri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PPn BM Impor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Contra Post		8.895.620	0	8.895.620	0	0	0	1.650.000	347.880.232	349.530.232	358.425.852	
	TU Nihil		0	0	0	0	0	0	2.042.670.028	70.148.276	2.112.818.304	2.112.818.304	
	Penyesuaian BOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Pengeluaran		17.766.932.26	1.730.296.876	19.497.229.14	233.267.391	0	233.267.391	13.350.482.85	2.147.056.314	15.497.539.17	35.228.035.704	
			5		1				8		2		
	Saldo Kas		0	0	0	0	0	0	538.617.516	(538.617.516)	0	0	

Semarang, 31 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran

Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh:

PRINTED BY GRMS JATENG

(DHONI WIDIANTO, S.Sos,MSi)
NIP. 19731015 199703 1 002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

(WORO ENDAH SEPTIARTI, SE)
NIP. 19800922 200903 2 003